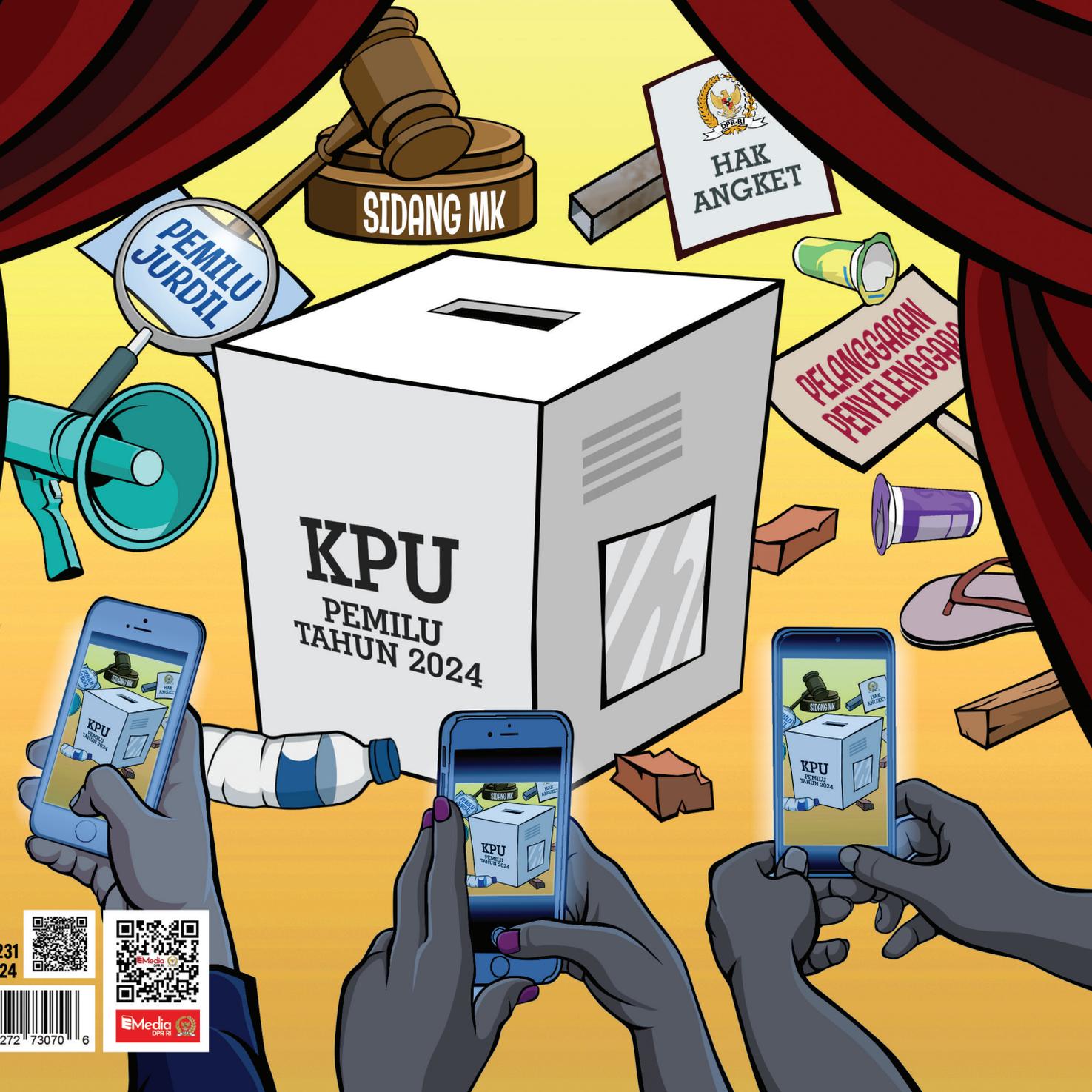




MAJALAH

Parlementaria

Melihat Pemilu 2024



EDISI 231
TH. 2024



7 25272 73070 6





Biro Pemberitaan Parlemen

Parlementaria

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Iknurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puncto Pranowo, Singgih Kinanti Rim-bani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsa Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF

ANALIS MEDIA

Suplian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

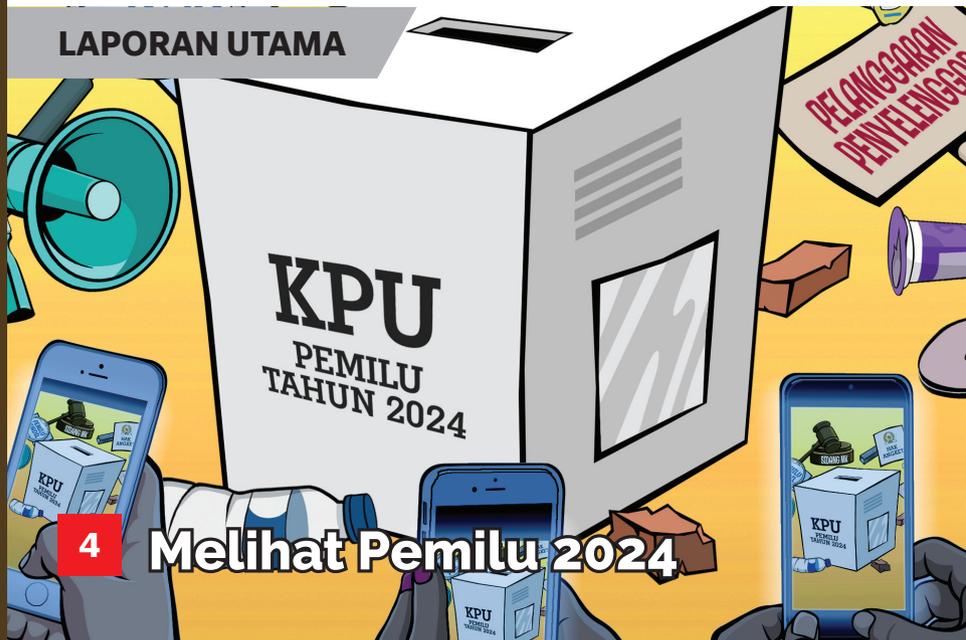
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

LAPORAN UTAMA



4

Melihat Pemilu 2024

4

PROLOG Melihat Pemilu 2024

6

LAPORAN UTAMA

● Pemilu 2024 Berjalan Baik

- Menjaga Suara Indonesia di Australia
- Partisipasi Kaum Muda Pada Pesta Demokrasi 2024
- Masalah Pengungsi Harus Segera Diselesaikan
- Kedatangan Pengungsi Timbulkan Gesekan Sosial

16

SUMBANG SARAN

Legitimasi Pemilu dan Pseudo Demokrasi

18

PENGAWASAN

Pencabutan IUP Kembali Jadi Wewenang Menteri ESDM

20

ANGGARAN

Menilik Sumber Dana Program Makan Gratis

22

LEGISLASI

RUU Penyiaran Progres Harmonisasi dan Sinkronisasi

24

FOTO BERITA

28

LENSA PARLE

Dalam Rengkuhan Ramadan

30

PROFIL

Diah Nurwitasari : Politik Amar Ma'ruf Nahi Munkar

34

KUNKER



PENGAWASAN



18 Pencabutan IUP Kembali Jadi Wewenang Menteri ESDM

ANGGARAN



20 Menilik Sumber Dana Program Makan Gratis

LEGISLASI



22 RUU Penyiaran Progres Harmonisasi dan Sinkronisasi

- 56** SOROTAN
Pemerintah Harus Kendalikan Harga Pangan
- 58** LIPUTAN KHUSUS
Merawat Relasi Strategis Indonesia-Rusia
- 60** DAPIL
- 70** TOKOH
Suhartono Jadi Suaka 'Jamrud Biru' Bagi ODGJ
- 72** PERNIK
Kinerja DPR RI dan Persepsi Publik
- 74** KIAT SEHAT
Kenali Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Musim Hujan
- 76** WISATA PENYENGAT:
Bertemu Pujangga yang Enggan Hilang di Bumi
- 78** HOBI
Sarmuji: Si Jago Masak
- 79** POJOK PARLE
Tangis Wakil Rakyat dan Ibu Menteri

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



www.dpr.go.id

Melihat Pemilu 2024

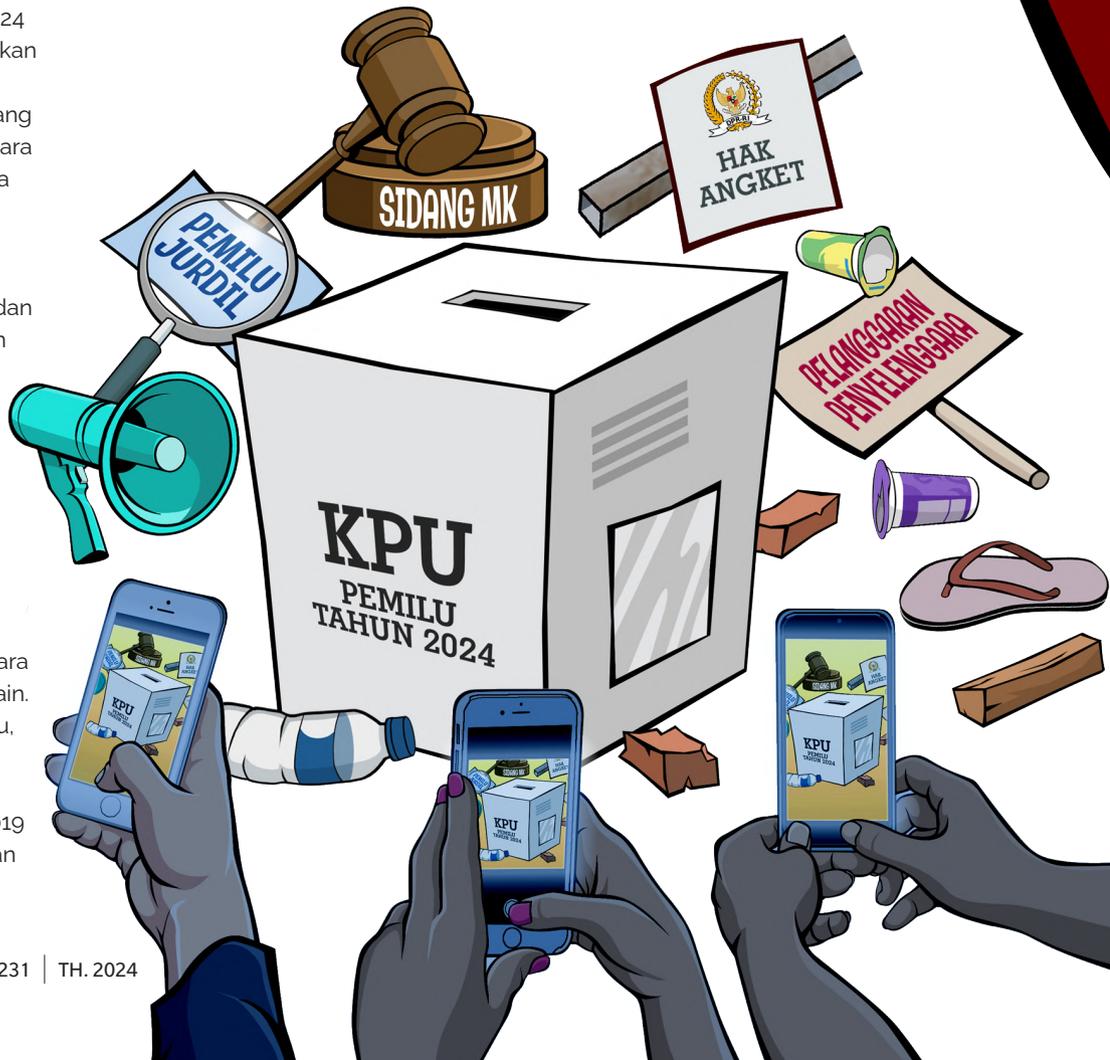
Pemilu 2024 dengan segala kontroversi dan polemiknya sudah dilewati bersama. 14 Februari lalu, masyarakat di Tanah Air telah menyampaikan aspirasi politiknya di bilik-bilik suara. Selalu ada warna berbeda setiap kali pemilu diselenggarakan. Kemarahan, kekalahan, keriang, dan kemenangan bercampur baur pascapencoblosan.



PEMILU 2024 menghadirkan pemilihan serentak yang digelar secara massal. Ada pemilihan presiden, pemilihan

legislatif DPR RI, DPRD provinsi dan kota/kabupaten, serta pemilihan DPD RI. Dari semua kontestasi pemilihan, pemilihan presiden (pilpres) yang paling populer ketimbang pemilihan legislatif. Pada pilpres ada perdebatan, kampanye massal, dan bahkan saling serang program kerja. Di sinilah yang membuat pilpres lebih "seru" daripada pileg.

Suka duka para penyelenggara pemilu juga menyimpan cerita lain. Dibanding pemilu lima tahun lalu, Pemilu 2024 jauh menurun dari sisi risiko kerja sebagai petugas TPS. Seperti diketahui Pemilu 2019 menelan banyak penyelenggaraan



pemilu menjadi korban, karena kelelahan. Kini, sudah jauh lebih baik. Berkaca pada pemilu lima tahun lalu, perhatian pada kesehatan dan kesejahteraan penyelenggara pemilu relatif lebih baik.

Belum lagi, cerita para pemilih baik di dalam maupun luar negeri. Parlementaria merekam pengalaman para pemilih di luar negeri yang banyak terkendala persoalan teknis, termasuk para penyelenggaranya. Ada juga rekaman testimoni para pemilih dan penyelenggara pemilu di dalam negeri. Semuanya tersaji dalam laporan utama Parlementaria edisi Maret 2024.

Tak lupa, Parlementaria juga menyajikan data dan fakta yang terbingkai dalam infografis seputar Pemilu 2024. Data tersebut memperkaya khasanah politik Indonesia. Rekaman pemilu dalam data tersaji sebagai pembanding dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini, PDI Perjuangan tetap menjadi kampiun. Bahkan, meraih *hattrick* sebagai partai dengan raihan suara terbanyak tiga pemilu berturut-turut.

Dan kejutan baru, PPP ternyata tak lolos ambang batas parlemen. Sehingga, partai berlambang Ka'bah tersebut tak bisa lagi menempatkan para wakilnya di DPR RI. Kini, parlemen menyisakan delapan



Rakyat bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas, mandiri, gembira ria, dan tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun



Pasca pengumuman perolehan suara oleh KPU, seperti biasa Mahkamah Konstitusi banjir gugatan sengketa pemilu. Dari gugatan pasangan capres cawapres yang kalah, sampai para caleg yang gagal meraih kursi parlemen.

partai politik. Kejutan lainnya, banyak anggota DPR RI petahana tak lagi terpilih. Wajah baru justru banyak bermunculan.

Pada 20 Maret lalu, KPU sudah mengumumkan hasil rakapitulasi akhir perolehan suara nasional. Delapan partai yang lolos ambang batas parlemen, yaitu PDI Perjuangan 16,72%, Golkar 15,28%, Gerindra 13,22%, PKB 10,6%, Nasdem 9,65%, PKS 8,42%, Demokrat 7,43%, dan PAN 7,23%. Sedangkan PPP hanya meraih 3,87%.

Pasca pengumuman perolehan suara oleh KPU, seperti biasa Mahkamah Konstitusi banjir gugatan sengketa pemilu. Dari gugatan pasangan capres cawapres yang kalah, sampai para caleg yang gagal meraih kursi parlemen. Dua pasang capres cawapres yang mengajukan gugatan ialah Anis Baswedan/Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo/Mahfud MD. Para petahana legislator yang tak terpilih juga ikut meraimaikan gugatan ke MK.

Lalu apa penilaian anggota DPR terpilih atas penyelenggaraan pemilu kali ini? Parlementaria berhasil mewawancarai Heri Gunawan Anggota Komisi II DPR RI pertengahan Maret lalu. Secara umum penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan baik. Bahkan, dinilai sudah memenuhi prinsip adil, jujur, dan demokratis.

Para penyelenggara pemilu juga mendapat apresiasi atas kerja kerasnya menghadirkan pemilu yang damai sesuai harapan

rakyat Indonesia. Hergun, begitu Heri Gunawan akrab disapa, mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2024 secara keseluruhan yang berjalan dengan baik, demokratis, jujur, dan adil sesuai peraturan perundang-undangan.

"Para penyelenggara pemilu telah menunjukkan kinerja yang optimal, serta dipadu dengan kolaborasi dan kerja sama yang solid, sehingga pemilu bisa terlaksana sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia," katanya. Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.

Rakyat bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas, mandiri, gembira ria, dan tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Semua tahapan pemilu berjalan lancar. Menurut legislator terpilih dari dapil Jabar IV ini, ada sedikit peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 ini. Pada 2019 partisipasi pemilih 81,69 persen dan pada 2024 81,97 persen. Angka partisipasinya naik tipis.

Tak hanya gugatan sengketa pemilu yang meramaikan MK, DPR RI juga sedang ramai dengan wacana hak angket atas pemilu yang dinilai sebagai anggota dewan penuh kecurangan. Wacana itu mewarnai interupsi pada rapat paripurna pertengahan Maret lalu. Akhirnya, apapun hasil proses hukum di MK dan proses politik di DPR, tak menurunkan kualitas demokrasi. Dan DPR pun siap menyambut para wakil rakyat terpilih hasil Pemilu 2024.

Pemilu 2024 Berjalan Baik

Secara umum penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan baik. Bahkan, dinilai sudah memenuhi prinsip adil, jujur, dan demokratis.



PARA penyelenggara pemilu Juga mendapat apresiasi atas kerja kerasnya menghadirkan pemilu yang damai

sesuai harapan rakyat Indonesia. *Parlementaria* menghubungi Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan via *Whatsapp* untuk dimintai pandangannya soal penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hergun, begitu ia akrab disapa, mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2024 secara keseluruhan yang berjalan dengan baik, demokratis, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Para penyelenggara pemilu telah menunjukkan kinerja yang optimal, serta dipadu dengan kolaborasi dan kerja sama yang solid, sehingga pemilu bisa terlaksana sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Rakyat bisa



FOTO: MUNICHEN/ANR

Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan. Pemilu kali ini cukup berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

“

Pemungutan suara telah kita lewati bersama pada 14 Februari 2024. Sementara itu rekapitulasi penghitungan hasil suara juga sudah dilakukan pada 20 Maret 2024

menggunakan hak pilihnya secara bebas, mandiri, gembira ria, dan tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.

"Tahapan demi tahapan dalam pemilu dapat berjalan dengan lancar. Saat ini sedang memasuki tahapan ke-9 dari total 11 tahapan. Tahapan ke-9 adalah pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara telah kita lewati bersama pada 14 Februari 2024. Sementara itu rekapitulasi penghitungan hasil suara juga sudah dilakukan pada 20 Maret 2024," ungkap Hergun pertengahan Maret lalu.

Rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan KPU diharapkan berjalan dengan lancar, dan bisa diselesaikan sesuai batas waktu

yang ditetapkan. Sehingga, pengumuman hasil pemilu bisa diselenggarakan pada siang hari dan bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemilu yang kondusif juga diharapkan mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilihan legislatif mencapai 81,69%. Adapun dalam pemilihan presiden mencapai 81,97%. Diharapkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 juga meningkat signifikan.

Anggota F-Gerindra DPR itu menambahkan, Pemilu 2024 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Bahkan, Pemilu 2024 juga terbukti berhasil menghadirkan rasa aman dan keselamatan bagi rakyat maupun penyelenggara pemilu.

Meskipun masih ada laporan mengenai penyelenggara pemilu yang meninggal dunia,



FOTO: MUNICHEN/NR

Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan.

namun jumlahnya turun drastis dibanding Pemilu 2019. Hal ini patut diberikan apresiasi dan menjadi catatan untuk meningkatkan keselamatan personil penyelenggara pemilu pada pemilu mendatang.

Ia menilai, Pemilu 2024 sudah lebih baik daripada pemilu

sebelumnya. Tahapan demi tahapan dapat dilalui dengan baik dan lancar. Rakyat juga bisa berpartisipasi dengan rasa aman dan nyaman, terutama dalam kampanye dan pemungutan suara.

"Tidak ada gesekan yang keras di masyarakat sebagaimana Pemilu 2019. Rakyat secara keseluruhan dapat mengikuti tahapan pemilu dengan gembira ria, tanpa intimidasi, maupun gesekan di akar rumput. Perdebatan di medsos juga masih dalam batas-batas kewajaran," pungkasnya.

Soal wacana penggunaan hak angket di DPR, legislator dapil Jabar IV ini mengatakan, hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki parlemen dengan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Wacana hak angket pemilu yang digulirkan, bisa kami sampaikan hingga saat ini belum ada pengajuan secara resmi. Jadi, semuanya masih wacana. Kami tidak bisa berandai-andai mengenai hal yang belum ada," tutup pria asal Sukabumi ini.

tf/mh

“

Tidak ada gesekan yang keras di masyarakat sebagaimana Pemilu 2019. Rakyat secara keseluruhan dapat mengikuti tahapan pemilu dengan gembira ria, tanpa intimidasi, maupun gesekan di akar rumput. Perdebatan di medsos juga masih dalam batas-batas kewajaran



Mengirim Suara dari Tanah Skandinavia

Jauh dari belahan Eropa Utara, Gita Ayu Pratiwi (33) dan Yolan Erlanda (33) tetap ikut meramaikan pesta demokrasi. Saat di tanah air baru dilakukan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, pasangan ini telah terlebih dahulu mengirimkan suaranya pada akhir Januari 2024.



"AKU *tuh* sudah terdaftar lama ya, kan di sini *tuh* sudah dari tahun lalu (2023) jadi sudah ngurusin surat pindah memilih dan lain sebagainya. Jadi, sama panitianya

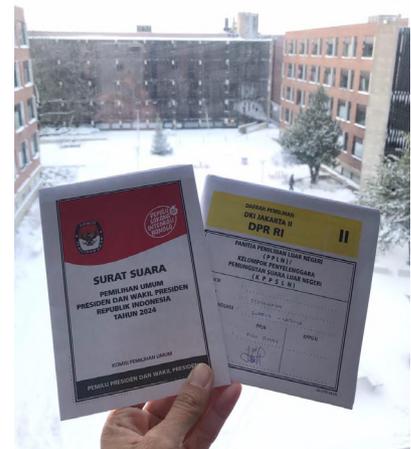
dikirim surat (suara) ke rumah terus dicoblos terus kita kirim balik," kata Gita kepada **Parlementaria** melalui panggilan suara di bulan Februari lalu.

Terdapat dua Tempat Pemilihan Suara (TPS) di Swedia dan semuanya berada di Stockholm, ibu kota negara yang berjarak lebih dari 600 km dari kota tempat tinggal Yolan dan Gita di Kota Lund. Segera setelah surat suara diterima, ia pun langsung menggunakan haknya dan mengirimkan kembali surat suara ke Stockholm.

"Begitu terima aku *coblos* terus kirim balik takut dimainin. Rada takut juga, kalau dikirim nanti disana diapa-apain tapi lebih takut (surat suara) diapa-apain anak saya," kata ibu dengan satu anak ini sambil berkelakar.

Gita tak menemukan kesulitan apapun dalam proses pemindahan daftar pemilih. Para petugas di KBRI Stockholm dengan sigap membantunya sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di Swedia. Setelahnya, KBRI dan PPLN hanya melakukan konfirmasi berkala terlebih saat harus mengirimkan surat suara.

Ada tantangan tersendiri saat melakukan pemungutan suara dengan metode pos. Sebelumnya, pemilih dijadwalkan akan menerima surat suara pada 17 Januari 2024 namun realitanya, Gita baru menerima beberapa hari setelahnya bahkan ada pula surat suara kembali



ke Stockholm tanpa diterima oleh si pemilik suara.

"Jadi ada beberapa temanku yang *nggak* bisa milih, bukan *nggak* bisa milih *sih* karena suratnya *nyasar* akhirnya *dibalikin* lagi ke Stockholm. Kalau dari Stockholm dibalikin lagi kesini kan makan waktu lagi, belum dari sini dikirim ke Stockholm lagi. *Nggak kekejar*. Jadi kalau dia mau nyoblos dia harus ke Stockholm, ada masalah-masalah teknis kayak gitu lah," tuturnya.

Gita bercerita, ada juga mahasiswa Indonesia yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan tak bisa merasakan fasilitas pos sehingga mereka harus menempuh perjalanan ke Ibu Kota. Sebagai informasi, tiket kereta cepat dari Lund ke Stockholm dibanderol seharga 1.300 Krona atau hampir Rp2 juta.

Gita dan banyak WNI lainnya di dataran Eropa mungkin tak tersentuh gegap-gempita pesta demokrasi. Tapi, tanpa larut dalam warna-warni kampanye mereka tetap antusias menggunakan hak pilihnya, mengirim suara dari tanah Skandinavia. uc/mh



Menjaga Suara Indonesia di Australia

Pemilu kali ini memberikan cerita yang berbeda bagi Achmad Faisal Nurghani, mahasiswa asal Indonesia yang sekarang berdomisili di Perth, Australia. Pemilu serentak 2024 memang bukanlah pemilu pertamanya tapi ini adalah kali pertamanya pemilu di luar negeri sekaligus pengalaman pertama terlibat langsung dalam rangkaian pesta demokrasi.



ICAL begitu pria ini akrab dipanggil, ia menyandang jabatan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Perth pada

pemilu serentak 2024 ini. Wilayah kerjanya tak main-main, meski 17 TPS terkonsentrasi di Kota Perth, namun tanggung jawabnya membentang di wilayah Australia Barat.

"Karena kepikiran kapan lagi join, di dalam negeri enggak pernah ikutan apa-apa. Sekali seumur hiduplah nyoba dan ternyata pusing banget. Jadi, kayaknya enggak lagi deh," katanya seraya tertawa.

Tugas Panwaslu Perth dimulai segera setelah dilantik di Bulan April 2023. Ical dan timnya menyertai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam setiap tahapan pemilu mulai dari penyusunan DPT hingga logistik. Menurutnya, kerja Panwaslu di Perth tak semata menjadi pengawas tapi juga pendamping yang tak jarang ikut membantu tugas PPLN.

"Kalau di sini kita jadi rekan kerja gitu, karena kan PPLN-nya 5 orang aja. Jadi kita kayak pendamping aja bukan pengawas, setiap kegiatan bareng-bareng terus," tambahnya.

Pemilu di Perth diselenggarakan pada Minggu (10/2/2024) lalu. Namun, penghitungan surat suara baru dilakukan pada 14 Februari, bersamaan dengan perhitungan yang dilakukan di dalam negeri. Dengan gamblang ia mengatakan tak ada masalah berarti sepanjang tugasnya.

Yang paling berat adalah menghadapi para calon pemilih yang tak terdaftar di DPT, DPS namun tak memenuhi kriteria sebagai pemilih khusus. Panwaslu Perth juga melakukan terobosan dengan membuat infografis terkait aturan dalam perhitungan suara. Tujuannya satu, menghindari debat kusir.

Ical mengaku mendapat banyak pengalaman, termasuk saat berjumpa para WNI yang berjuang gigih mendapatkan penghidupan yang



lebih baik di negara orang. Mahasiswa program magister di *The University of Western Australia* ini tak menampik bahwa ia mendapatkan beberapa keuntungan lainnya. Panwaslu dan PPLN mendapat honor sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga bercerita bahwa memiliki kesempatan untuk berkunjung ke kota lain bahkan pulang ke Indonesia.

"Senangnya diajak jalan-jalan. Jadi saya dapat kesempatan ke Sydney karena ada Bimtek (bimbingan teknik) dari Bawaslu terus ke Melbourne waktu pelantikan yang awal. Terus balik ke Indonesia untuk Bimtek yang terakhir plus dapet honorlah," ungkap Ical.  [uc/mh](#)

“

Panwaslu Perth juga melakukan terobosan dengan membuat infografis terkait aturan dalam perhitungan suara.

Partisipasi Kaum Muda Pada Pesta Demokrasi 2024

Tanggal 14 Februari 2024 menjadi momen bersejarah. Pasalnya, bukan hanya merayakan kasih sayang, momen tersebut juga merupakan momen bagi masyarakat Indonesia untuk memberikan suaranya pada pesta demokrasi Pemilu 2024.



SEMAKIN menarik, pada tahun 2024 ini jumlah pemilih muda yang didominasi kelompok gen z dan milenial mencapai lebih dari 50%. Untuk

itu, Pemuda memegang peranan penting perayaan pesta demokrasi 2024 ini. Tak sekadar memberikan hak suaranya, beberapa dari mereka pun turut terjun sebagai abdi negara dalam sehari dengan menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Menjadi Pemilih Cerdas

Adinda (24 tahun), seorang pemudi asal Kediri yang memilih di TPS 008 di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, mengungkapkan rasa bahagiannya usai memberikan hak suara pada Pemilu 2024 ini. Ia merasa bangga telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang dapat memberikan hak suaranya memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan.

"Aku merasa lega karena sudah menuntaskan kewajiban sebagai warga negara sekaligus bangga juga karena di pemilu kali ini aku benar-benar melakukan riset dan memanfaatkan fasilitas yang aku punya untuk cek rekam jejak dan

visi misi terutama dari Capres dan Cawapres yang sesuai dengan hati nurani dan akal sehat," ungkap Adinda beberapa waktu lalu.

Berperang Melawan Kantuk

Pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi momen pertama bagi Anggit (24 tahun) untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Tak hanya sebagai pemilih, tahun ini dirinya pun memberanikan diri membantu jalannya pelaksanaan pesta demokrasi dengan menjadi petugas KPPS di TPS 02, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.

Walau harus menahan diri dengan berperang melawan kantuk, dirinya senang telah ikut berpartisipasi dalam jalannya pesta demokrasi 2024 ini.

“

Lelah pasti, harus menahan ngantuk karena harus bekerja dari pagi pukul setengah 7 sampai dini hari.



"Lelah pasti, harus menahan ngantuk karena harus bekerja dari pagi pukul setengah 7 sampai dini hari. Tapi senang dan bangga, karena bisa ikut berperan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini," ungkap Anggit.

Tak hanya harus melawan kantuk, ia juga berbagi pengalaman lainnya sebagai petugas KPPS Pemilu 2024 ini untuk pertama kalinya. Dari masih banyaknya pemilih yang lupa membawa persyaratan seperti Surat Pemberitahuan dan KTP hingga harus membantu beberapa pemilih yang merupakan lansia dan sedang sakit door to door ke rumahnya.

"Walau menjadi pemilih yang paling melelahkan tapi alhamdulillah TPS 02 aman, baik dari sisi kesehatan para petugas KPPS, saksi, dan linmas," ungkapnya.  gal/mh

PEMILU 2024



Jumlah Daftar
Pemilih Tetap:

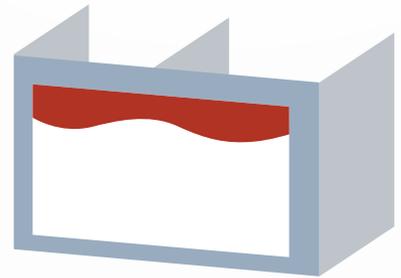
204.807.222

38 Provinsi

84 Daerah
Pemilihan
(dapil)

Panitia Pemilihan
Luar Negeri PPLN

128



• TPS Dalam Negeri • TPS Luar Negeri
820.161 **3.059**



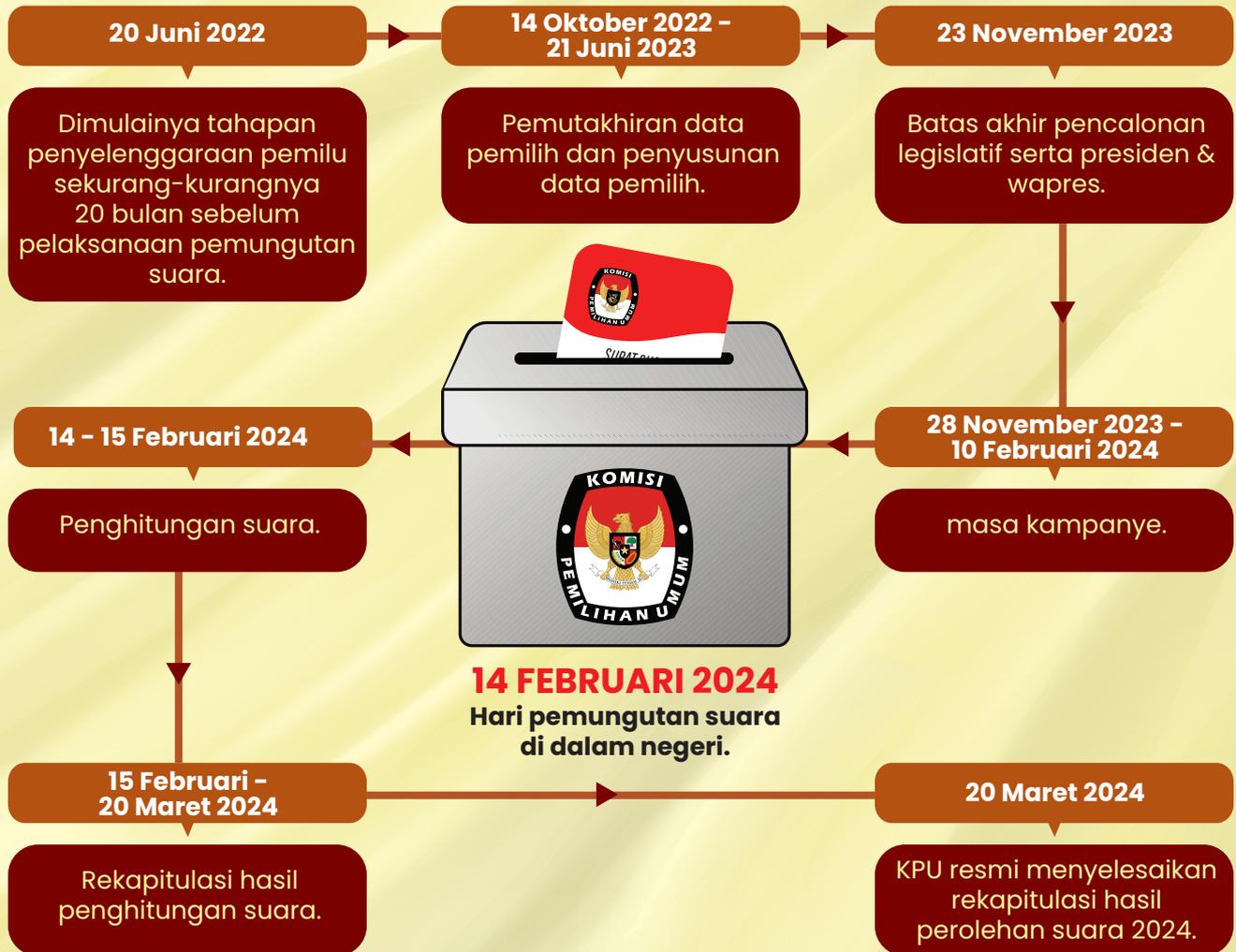
Total suara
sah Pilpres:

164.227.475

Total suara
sah Pileg:
151.796.631



TAHAPAN PEMILU 2024



PENETAPAN HASIL PEMILU

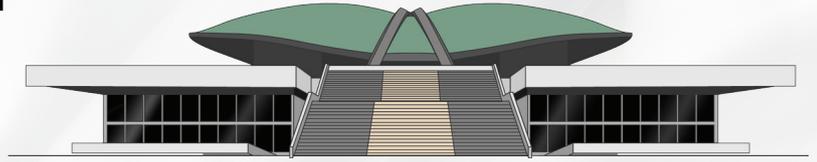
- Jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, penetapan hasil paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi.
- Jika terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu maka penetapan hasil paling lambat tiga hari pasca-putusan MK.

PENGUCAPAN SUMPAH JANJI

- DPRD Kota/ Kabupaten & Provinsi : **Disesuaikan dengan akhir masa jabatan**
- DPR RI dan DPD RI: **1 Oktober 2024**
- Presiden & Wakil Presiden: **20 Oktober 2024**



HASIL PEMILU LEGISLATIF 2024



	PKB	:	16.115.655 suara	(10,61%)		Partai Hanura	:	1.094.588 suara	(0,72%)
	Partai Gerindra	:	20.071.708 suara	(13,22%)		Partai Garuda	:	406.883 suara	(0,26%)
	PDIP	:	25.387.279 suara	(16,72%)		PAN	:	10.984.003 suara	(7,23%)
	Partai Golkar	:	23.208.654 suara	(15,28%)		PBB	:	484.486 suara	(0,31%)
	Partai NasDem	:	14.660.516 suara	(9,65%)		Partai Demokrat	:	11.283.160 suara	(7,43%)
	Partai Buruh	:	972.910 suara	(0,64%)		PSI	:	4.260.169 suara	(2,80%)
	Partai Gelora	:	1.281.991 suara	(0,84%)		Partai Perindo	:	1.955.154 suara	(1,28%)
	PKS	:	12.781.353 suara	(8,42%)		PPP	:	5.878.777 suara	(3,87%)
	PKN	:	326.800 suara	(0,21%)		Partai Ummat	:	642.545 suara	(0,42%)



PDI PERJUANGAN

PDIP (16,72%)
25.387.279 suara



GOLKAR (15,28%)
23.208.654 suara



GERINDRA (13,22%)
20.071.708 suara



PKB (10,61%)
16.115.655 suara



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

NASDEM (16,72%)
14.660.516 suara



PKS (16,72%)
12.781.353 suara



DEMOKRAT (16,72%)
11.283.160 suara



PAN (16,72%)
10.984.003 suara



DISKURSUS HAK ANGKET

Pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/31) lalu, diskursus hak angket bergulir dan ramai dibicarakan. Hak angket kali ini berkenaan dengan kecurangan pada Pemilu 2024. Interupsi pun bersahutan pada rapat paripurna kala itu. Berikut beberapa pandangan para anggota DPR soal hak angket pemilu.

Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada, maupun pemilu ke depan. Untuk itu, kami mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, interpelasi, angket atau apapun, supaya kualitas pemilu ke depan harus ada koreksi.

Mengoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya dalam pelaksanaan pemilu kemarin.

Aria Bima (F-PDI Perjuangan)



Pertama perlu diingat bahwa Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal kecurangan dan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, maka perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional.

Hak Angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti bisa ditindaklanjuti sesuai UU dan jika tidak terbukti ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional.

Aus Hidayat Nur (F-PKS)



Hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket dan melalui angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu.

Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata berdarah-darah dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 1998 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu, pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi.

Luluk Nur Hamidah (F-PKB)



Saya berpikir bahwa untuk persoalan ini (hak angket) ajukan saja, hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi, dan bahkan dalam perhitungan ini kita bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Jika ada hal lain saya kira tugas konstitusional bisa digunakan namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian dari pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu.

Herman Khaeron (F-Demokrat)



➔ Apa itu Hak Angket?

DPR dibekali tiga hak, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.



Hak Angket?

Pasal 79 ayat (3) UU No.17/2014

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

➔ Syarat Pengusulan Hak Angket

Pasal 199 UU No.17/2014

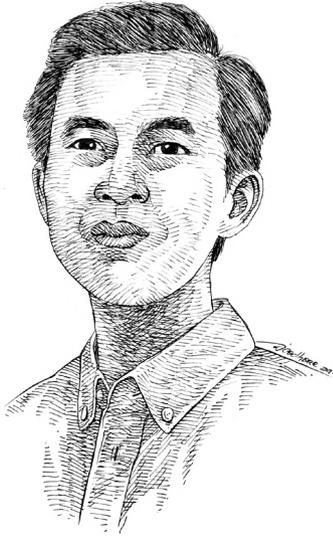
- Diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.
- Disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit mengenai, materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.
- Mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket

Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 2020:

1. Usul hak angket disampaikan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR.
2. Usul hak angket diumumkan oleh Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh anggota.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan Rapat Paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
4. DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket dalam Rapat Paripurna DPR.
5. DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan Panitia Angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi.
6. Panitia Angket ditetapkan dengan Keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara dan disampaikan kepada Presiden.
7. Panitia Angket melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah serta dapat juga meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi dan/atau pihak terkait lainnya.
8. Dalam melaksanakan hak angket, Panitia Angket berhak meminta pihak tertentu yaitu pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan dengan meminta secara tertulis kehadiran mereka dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud pernyataan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
9. Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.
10. Rapat Paripurna memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Usul hak angket dinyatakan selesai dan materi hak angket tidak dapat diajukan kembali pada periode masa keanggotaan DPR yang sama.
12. Keputusan DPR harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.
13. Keputusan DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan diambil dalam Rapat Paripurna DPR.
14. DPR dapat menindaklanjuti keputusan DPR sesuai dengan kewenangan DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 🏃 (gal/mh)

HAK ANGKET



Oleh:
Dedi Kurnia Syah Putra
 Direktur Eksekutif Indonesia
 Political Opinion (OPI)
 Pengajar Tetap Komunikasi Politik
 Universitas Telkom, Bandung

BDan, pemilihan umum (pemilu) menjadi representasi penanda itu. Dalam catatan sejarah politik di Indonesia, pemilu dengan kualitas demokratis dicirikan secara sederhana bisa dilihat dari dua antusias, yakni antusias pemilih dan pilihan.

Dengan dua ciri antusias itu, pemilu tahun 1950 menjadi yang paling populer, di mana antusiasme pemilih yang tinggi, serta jumlah pilihan yang juga besar. Tiga gelombang afiliasi partai politik menjadi pilihan rakyat pada tahun tersebut, komunisme, islamisme, dan nasionalisme.

Hari ini, Indonesia sudah dipastikan tidak akan mengulang nuansa Pemilu 1950 itu, mengingat komunisme yang dipresentasikan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi dilarang, bahkan hingga ideologinya sekalipun telah haram di tanah Nusantara ini.

Legitimasi Pemilu dan Pseudo Demokrasi

Salah satu penanda demokrasi di satu negara berjalan atau dijalankan dengan baik, ketika proses regenerasi kepemimpinannya melibatkan rakyat secara langsung.

Legitimasi Pemilu

Kualitas demokrasi, utamanya dilihat dari perspektif pemilu di Indonesia saat ini tidak dapat hanya dilihat dari antusiasme, jauh lebih penting dan perlu adalah legitimasi. Legitimasi pemilu diperlukan untuk menghadirkan kepastian politik bagi rakyat, juga negara. Sehingga, pemerintahan yang dihasilkan dari proses pemilu mendapat dukungan penuh dari rakyat.

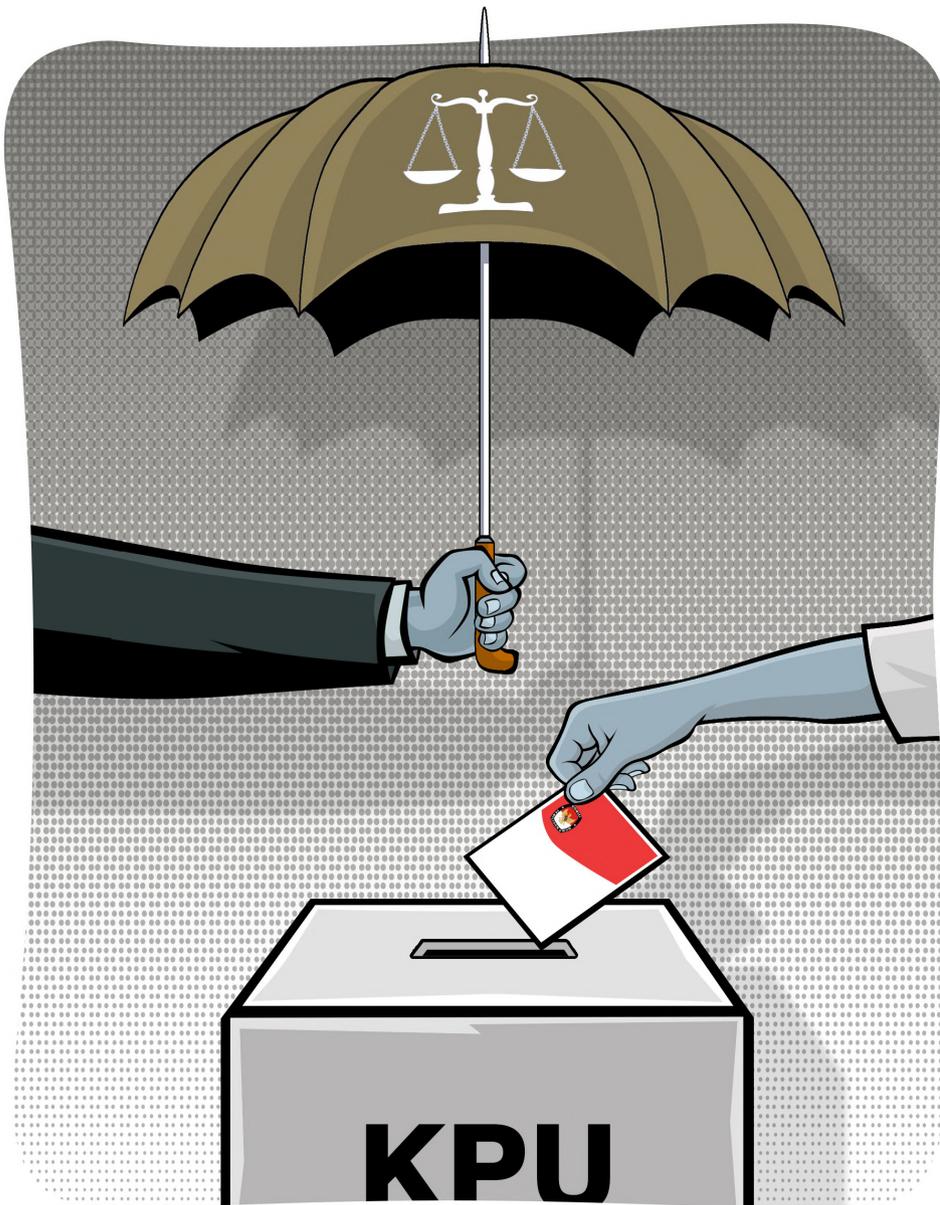
Persoalan yang saat ini riuh, soal propaganda dan opini pelanggaran pemilu, satu sisi keriuhan publik soal pelanggaran itu diperlukan agar ada pengawasan terhadap penyelenggaraan yang bisa legitim, di terima sebagai hasil pemilihan yang bersih serta terbuka. Tetapi, memahami pelanggaran pemilu tidak dapat hanya menyandarkan pada opini dan prasangka, sehingga diperlukan satu dudukan konsep yang jelas serta disepakati secara bersama, kesepakatan konsep itu disebut undang-undang.

Dalam memahami pemilu yang baru saja dijalani oleh seluruh rakyat Indonesia, secara umum sudah memenuhi perundangan. Misalnya, soal opini manuver presiden yang dianggap memihak, atau hadirnya salah satu cawapres yang melalui polemik di Mahkamah Konstitusi, hingga memunculkan wacana hak angket di DPR.



Persoalan yang saat ini riuh, soal propaganda dan opini pelanggaran pemilu, satu sisi keriuhan publik soal pelanggaran itu diperlukan agar ada pengawasan terhadap penyelenggaraan yang bisa legitim, di terima sebagai hasil pemilihan yang bersih serta terbuka.

Pemilu yang baik memang harus memiliki legitimasi, baik dari sisi proses hingga hasil yang menjadi rujukan publik. Hanya saja legitimasi semacam ini akan multi-tafsir, sehingga setiap kelompok bisa saja memberikan penilaian atas apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara, untuk itu memindai legitimasi harus dilihat dari sisi yang konsisten, yakni undang-undang.



Situasi yang ada dari sisi perundangan, sudah selesai dan bersih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki legitimasi penyelenggaraan yang memadai dengan mengakomodasi semua kepentingan dalam penyelenggaraan sesuai dengan regulasinya. Jika kemudian ada hal yang tidak tepat, maka itu akan menjadi ruang tafsir di meja persidangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait urusan legitimasi, Pemilu 2024 telah berjalan

dengan baik. Sisanya, hanya persoalan opini dan tafsir.

Pseudo Demokrasi

Kekeliruan umum soal demokrasi adalah hanya dilihat dari perspektif elit, di mana demokrasi sekadar³ar dimaknai teknis sebagai kekuasaan yang bersumber dari dan untuk rakyat. Implementasinya, membebaskan rakyat mengekspresikan semua hal dianggap bisa menjadi rujukan demokrasi, itu hanya pseudo demokrasi, ilusi demokrasi.

Immanuel Kant dalam artikel populernya yang diberi judul Perpetual Peace (1795), mengutip urgensi demokrasi bisa menjadi pedoman perdamaian sekaligus kemajuan sebuah negara. Secara prinsip, demokrasi mengedepankan kualitas kepemimpinan dan rakyat sebagai penerima konsekuensi atas kebijakan pemimpin.

Memang, risikonya adalah ketika kualitas kepemimpinan tidak sejalan dengan kemajuan yang diharapkan oleh rakyat. Dan agar tidak terjadi perdebatan antara kepentingan elit atau kekuasaan dengan rakyatnya, maka perlu penengah yang disebut sebagai konstitusi.

Kant dalam uraiannya menjelaskan, pemimpin demokratis dianggap bertanggung jawab atas mulainya perang oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan; pemimpin demokratis yang bertanggung jawab kepada publik cenderung memanfaatkan institusi diplomatik untuk menyelesaikan permasalahan.

Dua poin di atas menunjukkan jika kondisi sebuah negara, bergantung dari kepemimpinan, dan Pemilu 2024 di Indonesia perlu dilihat dari perspektif demokratis itu, karena jika hanya dilihat dari perspektif sipil, akan terus terjadi sengketa yang berlarut serta penyelesaian yang tidak konklusif.

Memahami dua hal di atas, legitimasi pemilu dan pseudo demokrasi, maka pemilu yang baru selesai di Indonesia masuk kategori penyelenggaraan yang cukup baik. Di mana penyelenggaraannya dilakukan secara mandiri, tanpa campur tangan kekuasaan, dan semua dijalankan sesuai dengan koridor yang konstitusional.

Adapun sengketa, polemik, dan opini pelanggaran di wilayah publik, tetap diperlukan sebagai bentuk memberikan peluang koreksi. Hanya saja, semua pihak pada akhirnya harus memiliki kesepakatan, yakni penyelesaian konstitusional, dengan jalur yang juga konstitutif.

Pencabutan IUP Kembali Jadi Wewenang Menteri ESDM

Pencabutan ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menuai polemik publik, khususnya bagi para pelaku industri pertambangan. Komisi VII DPR RI yang membidangi energi setuju kewenangan pencabutan IUP dikembalikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Polemik berawal dari pencabutan 2.051 IUP sejak tahun 2022 melalui Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahkan, sebelumnya IUP yang dicabut sempat mencapai jumlah 2.078. Publik melihat, sejatinya pencabutan IUP bukan wewenang Menteri Investasi/BKPM. Pasalnya, dalam UU Mineral dan Batubara (Minerba) No.3/2020, pasal 116, disebutkan bahwa yang melakukan pencabutan IUP adalah menteri yang terkait dengan pertambangan minerba. Itu menunjuk kepada Kementerian ESDM.

Di balik pencabutan IUP kerap terdengar isu dugaan penyimpangan. Selain proses yang berbelit-belit, untuk menghidupkan kembali IUP dan HGU (hak guna usaha) khusus lahan sawit, konon harus mengeluarkan sejumlah dana, ataupun pembagian saham. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto usai sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 5 Maret lalu, mengungkapkan, keinginannya memanggil Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait kabar dugaan penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut politisi Fraksi Nasdem ini menjelaskan bahwa rencana pemanggilan Bahlil oleh Komisi VII DPR dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan



FOTO: OI/INR

“

Tupoksi Satgas tersebut dalam mengevaluasi IUP milik perusahaan dinilai melampaui tugas tiga kementerian teknis terkait

Sugeng Suparwoto
Ketua Komisi VII DPR RI

Penataan Investasi. Pihaknya menilai, pembentukan Satgas yang diketuai Bahlil itu pun mencederai tata kelola pemerintahan.

Tupoksi Satgas tersebut dalam mengevaluasi IUP milik perusahaan dinilai melampaui tugas tiga kementerian teknis terkait, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional. "Kami sudah sejak awal tidak setuju yang namanya Satgas. Kami kembalikan kepada ini semula," tegasnya kepada wartawan.

Hal senada diungkap oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Ia menilai, keberadaan Satgas

tumpang tindih dengan kementerian terkait. Tugas pencabutan dan pemberian IUP sejatinya menjadi domain Kementerian ESDM, karena UU dan Keppres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM, bukan Kementerian Investasi.

Menurutnya, pengelolaan tambang tidak melulu dilihat dari sudut pandang investasi. Melainkan juga terkait lingkungan hidup dan kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Bahkan, politisi Fraksi PKS ini menilai keberadaan Satgas tersebut sarat kepentingan politik. Apalagi, pembentukannya dilakukan jelang kampanye Pilpres 2024 lalu. Sehingga, ia menengarai pembentukan Satgas ini

sebagai upaya legalisasi pencarian dana pemilu untuk salah satu peserta pemilu.

“Terlepas dari urusan politik, saya melihat keberadaan Satgas ini akan merusak ekosistem pertambangan nasional. Pemerintah terkesan semena-mena dalam memberikan wewenang ke lembaga tertentu. Urusan tambang yang harusnya jadi wewenang Kementerian ESDM kini diambil alih oleh Kementerian Investasi. Padahal, terkait pengelolaan tambang tidak melulu bisa dilihat dari sudut pandang investasi, tapi juga terkait lingkungan hidup dan kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam nasional,” jelas Mulyanto.

Pencabutan IUP Tupoksi Kementerian ESDM

Meski belum bisa menghadirkan Bahlil di ruang rapat Komisi VII DPR RI, namun Komisi VII telah menggelar rapat bersama mitra kerjanya, baik rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, maupun rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minerba (mineral dan batubara). Pada rapat kerja dengan Menteri ESDM ini, Mulyanto mengatakan, pencabutan IUP melalui SK yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM salah satu indikasi terjadinya mal administrasi dan tata kelola pemerintahan.



Pemerintah terkesan semena-mena dalam memberikan wewenang ke lembaga tertentu. Urusan tambang yang harusnya jadi wewenang Kementerian ESDM

Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI



Foto: Oji/NR

“Apabila terdapat perbedaan data pencabutan IUP antara Dirjen Minerba dengan BKPM dimungkinkan adanya pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM yang tidak atau belum dikirim tembusan ke Dirjen Minerba. Ini kalau kita baca halaman 1 sangat jelas bahwa kewenangan pencabutan seperti ini ada di tangan Menteri Investasi. Padahal, dalam Pasal 116 UU Minerba dikatakan bahwa yang melakukan pencabutan IUP adalah menteri yang terkait dengan pertambangan Minerba, bukan Menteri Investasi,” terang Mulyanto pada rapat kerja dengan Menteri ESDM, Maret silam.

Menteri Arifin sendiri menjelaskan bahwa Pasal 191, UU Minerba disebutkan, pertambangan IUP dan IUPK dapat dicabut oleh menteri, jika tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. “Bila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin,” ungkap Menteri Arifin pada Raker bersama Komisi VII DPR.

Terkait BKPM, Arifin mengungkapkan bahwa BKPM mendapatkan mandat pencabutan pada Januari-November tahun 2022. Namun, dalam proses pencabutan tersebut, pemerintah memberikan ruang pengajuan keberatan kepada pengusaha tambang atas pencabutan IUP tersebut.

Oleh karena itulah sampai 14 Maret 2024 sebanyak 585 IUP telah dibatalkan pencabutannya oleh BKPM yang terdiri dari 499 IUP mineral, 86 IUP batubara. Dari jumlah tersebut baru 469 IUP yang masuk dalam sistem minerba one data Indonesia (MODI). Sisanya sebanyak 4 IUP proses masuk dan 112 belum bisa masuk MODI, karena masih memiliki kewajiban pembayaran PNB. ayu/mh



Mendukung penuh Menteri ESDM mengembalikan kewenangan pencabutan IUP

Eddy Soeparno
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI



Foto: Oji/NR

Menilik Sumber Dana Program Makan Gratis

Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini.



FOTO:DEP/INR

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.

Hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar. Hitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, misalnya, menunjukkan belanja untuk program makan siang dan susu gratis mencapai Rp185,2 triliun per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan nilai Rp257,2 triliun dengan asumsi terdapat 70,5 juta penerima dan harga makanan Rp15 ribu per porsi per hari. Hasil kalkulasi Tim Kampanye

Nasional Prabowo-Gibran bahkan lebih besar; Rp450 triliun per tahun.

Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil. Pemerintah pun nampak sedang mencari alokasi anggaran yang tepat. Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menggagas relokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk merealisasikan program ini. Meski menurutnya, pembahasan program makan siang gratis di APBN 2025 masih menunggu pengumuman

resmi pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar. Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan KPU siapa pemerintah yang akan datang," kata Airlangga.

Namun, gagasan ini ditentang keras oleh DPR, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. "Demi program ambisius, jangan korbakan pendidikan kita!" tegas Fikri.

Politisi Fraksi PKS ini menyebut bahwa undang-undang mengamankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab itu, menurutnya dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan. "Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Silakan, pakai anggaran lain," serunya.

Dirinya mendesak pemerintah terutama Kemendikbudristek dan Kemenag untuk memperjuangkan



Negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. "Demi program ambisius, jangan korbakan pendidikan kita!"

Abdul Fikri Faqih
Wakil Ketua Komisi X DPR RI



FOTO: DEP/ANR

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira.

agar alokasi dana BOS tidak diutak-atik. Baginya, kebijakan program 'Makan Siang Gratis' ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklaturinya.

"Apalagi ini program non-pemerintah dari paslon yang belum resmi dilantik dan menjabat. Semua ada aturannya dalam undang-undang. Kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk pendidikan," tandas legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.

Senada dengan Fikri, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira pun menolak usulan ini. Menurutnya, jika rencana anggaran makan siang gratis dimasukkan dalam dana BOS, maka sekolah akan kerepotan.

Bahkan, Andreas dengan tegas mengusulkan kepada pemerintah membuat kementerian baru untuk menjalankan program tersebut. Ia merasa kasihan sekolah-sekolah yang harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan itu. "Saya sampai usulkan lebih baik bikin kementerian makan siang gratis saja sekalian," usulnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai, anggaran program makan gratis perlu

“

Jika rencana anggaran makan siang gratis dimasukkan dalam dana BOS, maka sekolah akan kerepotan.

Andreas Hugo Pareira
Anggota Komisi X DPR RI

masuk dalam APBN. Meski begitu, waktu pembahasan anggarannya bisa fleksibel. "Malah lebih enak (kalau dibahas anggarannya) di 2025, karena kesempatannya makin terbuka. Tapi pada saat sekarang (2024) pun ndak apa-apa, kita mengenal perubahan APBN (APBN-P) juga ya. Kalau memang mau (dibahas) sekarang enggak apa-apa, tapi nanti 2025 lebih baik dan lebih leluasa," ungkap Zulfikar.

Ia menilai, program makan siang gratis bila terakomodir dalam APBN, jadi contoh baik yang dilakukan Presiden Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024 mendatang. Pemerintahan yang sekarang dan sedang menjabat ini akan memberikan ruang bagi masuknya visi-misi program presiden terpilih yang baru tersebut.

"Coba dicek ya periode pemerintahan 2009-2014 itu ada nama program yang mirip. Waktu itu namanya PMTAS, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. Dulu anggarannya berapa? itu dari Kemendikbud sendiri loh ya. Sebenarnya dari sisi alokasi sudah pernah ada. Tinggal nanti dicarikan dari yang lain," terang politisi yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI ini. **we/mh**



FOTO: MUNICHEN/ANR

Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin.

RUU Penyiaran Progres Harmonisasi dan Sinkronisasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dari periode ke periode memang belum kunjung disahkan. Pada periode ini, optimisme muncul dan segera dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

RUU ini merupakan revisi dari UU No.32/2002 tentang Penyiaran. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang membahasnya secara intensif. Sebelumnya, Komisi I DPR yang menjadi *leading sector* atas RUU tersebut telah menyempurnakan sejumlah pasalnya. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari menginformasikan, Komisi I telah menyerahkan draf ini ke Baleg beberapa waktu lalu.

"Jadi setelah draf kami selesaikan, kami kirim ke Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi (dan) sinkronisasi. Kami sudah rapat dua kali dengan Badan Legislasi. Mudah-mudahan, satu kali rapat lagi selesai," ujar Kharis ketika ditemui Parlementaria beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan bahwa rencananya jika rancangan tersebut telah selesai dan disetujui di Baleg, Komisi I akan membawa RUU Penyiaran ke rapat



Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat mengikuti diskusi Forum Legislasi.

paripurna untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif Komisi I (tingkat I). Ia berharap proses tersebut bisa lekas diselesaikan.

“
revisi UU
penyiaran
ini, terdapat
tiga isu besar
yang menjadi
perhatian

Abdul Kharis Al Masyhari
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"Setelah paripurna nanti tentunya akan dikirim oleh DPR ke pemerintah. Dari pemerintah akan membuat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sandingan (untuk) dikirim ke kita (DPR RI) baru dimulai pembahasan, kalau nanti sudah ada (DIM dari Pemerintah) disandingkan dan sebagainya," jelas legislator dapil Jawa Tengah V ini.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari saat menjadi narasumber pada kegiatan Diskusi Forum Legislasi di Gedung Nusantara.

la mengakui bahwa dalam revisi UU penyiaran ini, terdapat tiga isu besar yang menjadi perhatian. Adapun dua di antaranya sudah selesai, yaitu isu *multiplexing* dan isu analog *switch off* karena telah termaktub dalam UU Ciptaker yang telah diterbitkan. "Dan sekarang (tinggal) masalah isi siaran," imbuah politisi Fraksi PKS ini.

la mengaku penyempurnaan yang dimatangkan oleh Komisi I setelah harmonisasi sebelumnya berfokus pada permasalahan digital. Peralnya, perubahan era informasi dan komunikasi saat ini menurutnya sangat dipengaruhi teknologi dalam penyiaran.

"Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh faktor teknologi siaran ya, sehingga ada hal-hal yang perlu ditambahkan, sehingga kita tambah. Enggak terlalu mendasar tapi memang kami pun melihat, oh ya memang perlu," terang Kharis.

Karena itu, ia menekankan bahwa dalam RUU Penyiaran ini, maka akan juga memuat regulasi mengenai penyiaran digital, seperti media baru. Sehingga, harapannya, baik siaran di TV terestrial maupun digital (media baru) menjadi ruang yang aman, khususnya bagi anak-anak.

"Ini kita membandingkan, kalau di TV terestrial (selama) ini diatur (tapi) kenapa yang (media baru) ini bebas. Paham ya? Akhirnya kan begini, di (media baru) sini siaran bebas tanpa aturan (tapi di TV Terestrial) di sini diatur izin itu. Dasarnya agar ruang siar Indonesia itu kondusif dan aman buat anak-anak," pungkasnya.

Menurut dia, UU Penyiaran yang saat ini eksis sulit mengakomodasi kemajuan teknologi dan perkembangan media baru yang ada saat ini. Dengan demikian, kata dia, revisi UU Penyiaran akan berisi aturan yang memperlakukan sama secara hukum terhadap seluruh bentuk siaran, terlepas dari ragam media yang digunakan, baik digital maupun konvensional.

Senada dengan itu, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai bahwa UU No.32/2002 tentang Penyiaran yang eksis saat ini belum mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru. Maka, revisi menjadi urgen. Terlebih, revisi UU ini telah tertunda sejak awal 2000.

Dave menegaskan, perlu regulasi yang ketat untuk melindungi nilai-nilai lokal dari budaya-budaya luar yang merusak. "Kita harus memiliki otoritas yang kuat untuk mengatur konten yang disajikan kepada masyarakat, sehingga tidak bertentangan

nilai-nilai luhur bangsa, khususnya generasi muda," tegasnya.

la juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan industri dalam menjaga kewibawaan informasi. "Kerja sama yang solid antara semua pihak adalah kunci untuk menjaga integritas dan pemahaman yang tepat tentang identitas dan nilai-nilai negara kita," tutupnya.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menyebut bahwa UU Penyiaran menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam hal pengawasan, terlebih penyiaran ini erat kaitannya dengan teknologi.

“

Kerja sama yang solid antara semua pihak adalah kunci untuk menjaga integritas dan pemahaman yang tepat tentang identitas dan nilai-nilai negara kita

Firman Soebagyo saat mengikuti diskusi Forum Legislasi. Anggota Baleg DPR RI

FOTO: ARIEF/NR



dengan nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa," tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebagai contoh, dirinya menjelaskan seperti beberapa media penyiaran digital yang kontennya menyebarkan ideologi LGBT yang bertentangan dengan nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia. Maka dari itu media asing harus mendapat pengawasan dari negara dan KPI. "Jadi, jangan sampai mereka ini merusak ideologi, idealisme, dan

Maka, perlu ada UU Penyiaran yang memuat fungsi pengawasan terhadap penyiaran saat ini.

Selain itu, Baleg pun menyoroti perlindungan media konvensional. Menurutnya, media konvensional tidak memiliki kekuatan seperti padat modal. Maka, perlu perlindungan. "Sehingga, nanti industri penyiaran yang skala menengah ada di daerah dan sebagainya itu harus ada perlindungan yang jelas," tegasnya.

hal/mh



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melepas para pemudik di halaman depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Untuk menyambut Idulfitri 1445 H /2024 M. FOTO: YOGA/ANDRI



Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Panglima TNI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan, Rabu (27/11/2024) mendatang, Komisi I DPR RI meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjaga netralitasnya. FOTO: MUNCHEN/ANDRI





Pimpinan Komisi VIII DPR RI saat melakukan konferensi pers pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Dalam Fase Awal 1000 Hari Kehidupan telah resmi dibawa kedalam Rapat Paripurna DPR RI atau pengambilan keputusan tingkat II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024). FOTO : TARI/ANDRI



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih dalam foto bersama usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor Universitas Pertamina Wawan Gunawan A Kadir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024). FOTO: MUNCHEN/ANDRI

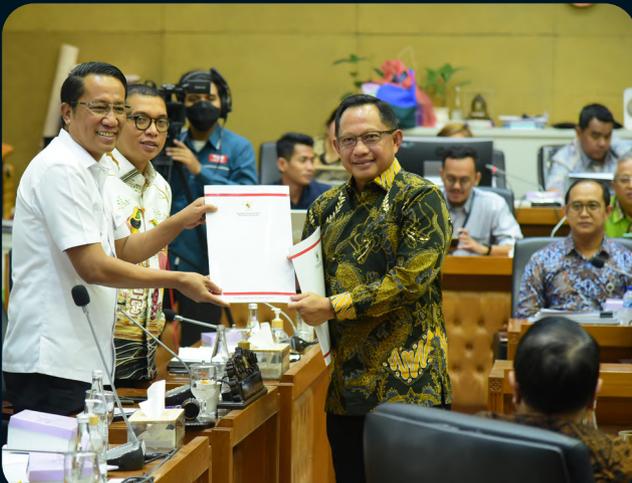




Ketua Pansus RUU Kelautan DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PAN Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
FOTO : JAKA/ANDRI



Pimpinan serta Anggota Baleg DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat menandatangani dan menyetujui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU DKJ di Ruang Baleg, Senin (18/3/2024) malam. FOTO: OJI/ANDRI



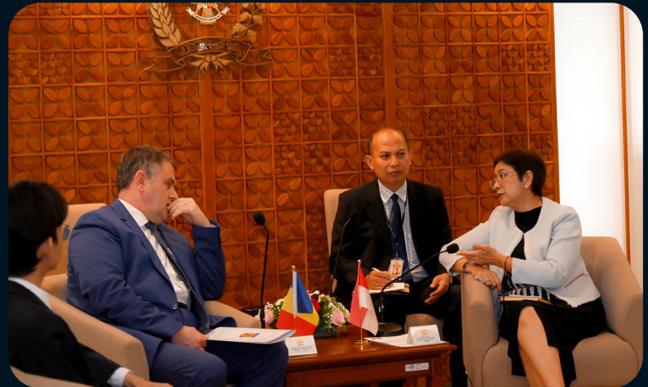
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). FOTO : ENO/ANDRI



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Sukamta saat menerima kunjungan Duta Besar Mesir Yasser Elshemy di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). FOTO: RUNI/ANDRI



Ketua GKSBR DPR RI-Parlemen Rumania, Nurul Arifin, didampingi Anggota GKSBR DPR RI-Parlemen Rumania, Anton Sukartono, saat menerima menerima Dubes Rumania Dan Adrian Balanescu di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2024). FOTO: MENTARI/ANDRI



Ketua GKSBR DPR RI-Jepang Puti Guntur Soekarno bertukar cinderamata usai pertemuan bilateral dengan Dubes Jepang Masaki Yasushi yang digelar di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024). FOTO : ENO/ANDRI



Dalam Rengkuhan Ramadan

NARASI : DEVI IRIANDI FOTO : JAKA, DEVI, FARHAN

Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia bagi seluruh umat muslim sedunia. Di bulan suci ini berlimpah keistimewaan yang diberikan 'Sang Khaliq' kepada umat pengikut ajaran Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang taat dan taqwa kepada Tuhan Yang Esa.

Di bulan Ramadan Allah SWT akan menggandakan setiap wujud amal kebaikan yang dilakukan umat Islam dengan lipatan ganjaran pahala dibandingkan bulan-bulan lainnya. Untuk itu, selayaknyalah sebagai insan yang lemah dan kerap berbuat salah, kaum muslimin dan muslimat berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah demi mengharap rahmat serta ampunan dari Nya.

Pada bulan mustajab ini segala doa akan di ijabah, pintu ampunan dibuka seluas-luasnya, gerbang rahmat dari langit pun terbentang tak terbatas pandang. Semesta bumi bermandi cahaya kasih Ilahi Robbi.

Begitu banyak aktivitas kebajikan yang dilakukan kaum muslimin di bulan puasa, beraneka rupa rutinitas ekstra yang juga terselenggara, yang bisa jadi berbeda dan tidak umum dilakukan di sebelas bulan lainnya. Keunikan polah dan laku masyarakat dalam mengisi dan menjalani bulan penuh maghfiroh tersebut tertuang indah dalam barisan bingkai seni lukisan cahaya 'Serba-Serbi Ramadan Mulia'  dep/mh





PROFIL

Diah Nurwitasari

POLITIK AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR

Bandung, akhir 1960-an. Kota ini terasa sejuk, indah, dan nyaman. Ada perbukitan dan gunung yang membuat lanskap kota kian menawan. Berjalan-jalan di kota ini sangat menyenangkan kala itu. Jalan raya juga belum padat dengan kendaraan. Hampir tak ada kemacetan.

Syahdan, seorang ayah di Jl. Bima, Cicendo Bandung, hidup bersahaja bersama istri tercinta. Ia seorang dosen pariwisata di sebuah kampus di Bandung. Kalender di dinding menunjukkan 24 Oktober 1967, hari yang menegangkan sekaligus membahagiakan. Hari itu, keduanya sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Tahmid tiada henti terucap dari bibir seorang ibu yang baru saja melakukan persalinan.

Bayi mungil perempuan telah lahir. Tangis bayi itu memecah kesunyian. Kelahiran bayi perempuan ini disambut suka cita keluarga besarnya, karena merupakan cucu perempuan pertama. Bayi itu kemudian diberi nama Diah Nurwitasari. Nuriata dan Siti Djubaedah adalah sepasang insan yang sedang berbahagia, karena sudah dikaruniai buah hati pertamanya.

Setelah kelahiran Diah, masih ada satu adik perempuannya yang lahir kemudian. Jadi, Diah adalah anak pertama dari dua bersaudara. Diah kecil hidup di tengah keluarga religius dan terdidik. Djubaedah, ibunda Diah merupakan ibu rumah tangga yang bersahaja. Sesekali ia membantu ekonomi keluarga dengan menjahit atau menerima pesanan makanan sampai merias.

Masa kecil yang dilewatkan di daerah Sawahkurung, Regol, Bandung, meninggalkan kenangan tak terlupakan bagi Diah kecil. Ia suka sekali bermain bersama sahabat-sahabat kecilnya. Permainan tradisional, seperti bermain lompat tinggi dengan karet dan congklak sangat disukai. Karena hampir semua sepupunya laki-laki, Diah juga sering bermain sepak bola, layangan, sampai kelereng. Senangnya mengingat masa kecil.

Mengawali pendidikan formal, Diah menempuh pendidikan dasarnya di SDN Ciateul sampai kelas



Diah Nurwitasari bersama suami tercinta.

3. Bersamaan dengan pindah rumah ke Kecamatan Cicendo, kelas 4 ia lanjutkan di SDN Merdeka Bandung sampai tamat, tahun 1979. Setiap hari ia naik becak atau angkot ke sekolah, karena jaraknya lumayan jauh dari rumah. Pelajaran sejarah dan bahasa sangat disukai saat duduk di SD.

Setamat SD, ia melanjutkan ke SMPN 1 Bandung pada 1979. Karena dekat dari rumah, ia pun biasa berjalan kaki ke SMP. Prestasi Diah sangat baik di sekolah. Selama duduk di SMP, Diah kecil selalu juara umum di sekolahnya. Ia memang murid yang cerdas dan disiplin. Bicara cita-cita sewaktu kecil, Diah ingin menjadi guru. Namun, seiring waktu, Diah ingin sekali menjadi ahli pertanian.

Waktu itu, ia suka sekali menyaksikan tayangan TVRI yang menyiarkan program pertanian. Dipengaruhi tayangan tersebut, Diah sangat suka menjadi penyuluh pertanian, karena bisa berbagi ilmu dengan para petani di desanya kelak.

Kuliah ke Jerman

Tamat SMP tahun 1982, Diah meneruskan pendidikannya di SMAN 3 Bandung. Semasa di SMA, ia selalu naik motor ke sekolah, karena jaraknya yang lumayan jauh. Banyak kenangan menarik semasa di sekolah dahulu. Dan kini Diah sudah tumbuh menjadi pemuda cerdas dan religius.

Setamat SMA tahun 1985, Diah diterima di Fakultas Kedokteran



Selalu menemui masyarakat di dapilnya.

UNPAD, Bandung. Ia mengaku, sebenarnya mendaftar ke FK UNPAD merupakan desakan keluarga. Keinginan Diah sendiri sebetulnya ingin kuliah di fakultas pertanian, seperti cita-citanya.

Satu semester kuliah di UNPAD, Diah tertarik mengikuti tes beasiswa yang diselenggarakan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), tahun 1986. Proyek beasiswa ini diinisiasi Menristek waktu itu BJ. Habibie. Program beasiswa tersebut diarahkan khusus untuk mempelajari teknik penerbangan ke Jerman. Ayahnya sangat mendukung Diah mengikuti program tersebut.

Diah pun berhasil mendapatkan beasiswa itu. Akhirnya, pemuda Diah resmi kuliah di Luft-und Raumfahrtstechnik (Aeronautical Engineering), Technische Universitaet (TU) Braunschweig, Jerman (1987-1994). Sebelum resmi kuliah, ia sempat kursus bahasa dan persiapan pra universitas dahulu di Studien Kolleg Hannover, 1986-1987.

"Perasaan pertama deg-degan, karena itu sebuah babak baru kehidupan di negeri orang. Tapi, karena pada dasarnya senang travelling, bersamaan

dengan itu, saya merasa senang bisa berpetualang menjelajahi daerah baru yang sangat berbeda dengan Indonesia. Hampir Setiap liburan kuliah, sengaja travelling ke berbagai kota, mengunjungi museum-museum, mengenal lebih dekat sejarah Eropa," ungkap Diah, menceritakan kehidupannya di Jerman.

Menemukan menu makanan ala Indonesia masih sulit waktu itu. Ia selalu belanja bahan makanan di toko

Asia. Jadi, Diah hampir selalu masak sendiri untuk menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Ia sendiri sebetulnya tidak kesulitan makan berbagai menu dari daerah atau negara lain. Ia, misalnya, suka dengan cita rasa makanan dari Turki, Italia, atau Jerman.

Sementara itu, selama menjadi mahasiswa, ia tak banyak terlibat pada organisasi ekstrakurikuler kampus, kecuali di Keluarga Mahasiswa Muslim dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman. Rindu kampung halaman masih selalu menghantui ketika pertama tinggal di Jerman. Tapi, seiring waktu bergulir, Diah merasa terbiasa dan mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Hampir sembilan tahun menuntut ilmu di Jerman, akhirnya tahun 1995, Diah kembali ke Tanah Air dan langsung bekerja di PT. IPTN. Ia ditempatkan di bidang *Aircraft Performance*. Setelah itu, Diah pindah bagian dan bergabung pada tim *Design Center* yang ingin memproduksi pesawat Jet N2130. Ketika pesawat tengah didesain, krisis ekonomi berkecamuk, memporak-porandakan ekonomi nasional.

Proyek Jet N2130 terhenti pada tahap *preliminary design*. Bahkan,



Perasaan pertama deg-degan, karena itu sebuah babak baru kehidupan di negeri orang. Tapi, karena pada dasarnya senang *traveling*, bersamaan dengan itu, saya merasa senang bisa berpetualang menjelajahi daerah baru.





gelombang PHK pun tak terhindarkan terjadi pula di IPTN hingga tahun 2000. Diah termasuk yang berhenti bekerja di IPTN yang kini sudah berganti nama menjadi PT. Dirgantara Indonesia (DI). Tahun 2002, Diah keluar dari PT DI dan kemudian memimpin Lembaga Pendidikan German Campus Center di Bandung.

Panggung Politik

Ketertarikan Diah pada dunia politik sebetulnya berawal di Jerman, saat sering berdiskusi soal isu-isu aktual dan keagamaan bersama para aktivis kampus. Ia mengaku banyak belajar tentang Islam. Pemahamannya tentang Islam terus terasah selama menjadi mahasiswa. Ia pun mulai memahami bahwa amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran) harus bisa diimplementasikan lebih jauh pada konteks bernegara.

Pemahaman keagamaan seperti ini terus membekas dan berpengaruh pada pandangan politik mantan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ICMI Jawa Barat ini. Pergaulannya dengan para aktivis kampus mengantarnya pada keputusan berpolitik. Kebetulan banyak mahasiswa di Jerman yang sudah berpolitik dan bergabung dengan Partai Keadilan yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Akhirnya, ia pun resmi menjadi



Pada Pemilu 2004, Diah ditugaskan menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jabar. Ia terpilih untuk periode 2004-2009. Bahkan, pada pemilu berikutnya, ia kembali terpilih untuk periode 2009-2014.

kader PKS.

Pada Pemilu 2004, Diah ditugaskan menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jabar. Ia terpilih untuk periode 2004-2009. Bahkan, pada pemilu berikutnya, ia kembali terpilih untuk periode 2009-2014. Pada Pemilu 2014, ia tak ditugasi partainya mengikuti kontestasi politik. Namun, ia ditugasi menjadi Tanaga Ahli Anggota F-PKS DPR RI Ledia Hanifa. Memasuki Pemilu 2019, Diah ditugasi partainya menjadi caleg DPR RI dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat).

Pada pemilu ini, PKS hanya mendapat satu kursi yang diwakili Adang Sudrajat sebagai peraih suara terbanyak PKS di dapil Jabar II. Sedangkan Diah meraih suara terbanyak kedua. Tapi, kemudian Adang Sudrajat wafat pada 2021. Partai kemudian menugaskan Diah menggantikan Adang sebagai anggota Pengganti Antar-Waktu (PAW) DPR RI, meneruskan priode yang ditinggalkan Adang. 1 November 2021, Diah resmi dilantik menjadi anggota DPR RI.

Mantan Ketua I Kaukus Perempuan Politik (KPPI) Jawa Barat ini, kemudian ditempatkan di Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, industri, dan riset. Dengan menjadi pejabat negara di parlemen, Diah terlibat langsung mengarsiteki berbagai kebijakan publik yang berdampak luas bagi rakyat Indonesia. Namun, sebagai politisi religius, ia tak melupakan prinsip politik amar ma'ruf nahi munkar-nya selama menjadi wakil rakyat di Senayan.

"Proses memahami amar ma'ruf nahi munkar itu, tidak hanya berhenti pada skala individu maupun keluarga, tetapi negara atau pemerintahan. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan ketika negara melakukannya. Juga banyak kemungkaran yang akan terhindar ketika negara terlibat dalam pencegahan. Itu yang menyebabkan saya terlibat dalam politik," ungkap peraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan UNPAD itu.

Begitulah kisah hidup singkat Diah Nurwitasari dari lahir hingga menjadi politisi. Sepuluh tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar plus tiga tahun menjadi anggota DPR RI merupakan kiprah politik yang mewarnai perjalanan hidupnya.

Walau sibuk sebagai anggota DPR RI, ia tak melupakan keluarga tercinta. Ada Abdul Hadi Wijaya, suami tercinta yang ternyata punya pandangan sama dalam membangun keluarga. Visi amar ma'ruf nahi munkar juga tak pernah lepas dari pandangan berkeluarga. 

RRI Bandung Tangkal Berita *Hoaks*



FOTO: BUNGA/NR

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan saat mengikuti pertemuan Kunjungan kerja Reses Komisi I DPR RI ke RRI Bandung, pada Rabu (8/2/2024).

Dalam upaya menjaga integritas dan keamanan proses demokrasi menjelang Pemilihan Umum 2024, Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menegaskan, Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung harus memperkuat tugasnya sebagai media pemersatu bangsa. RRI harus memastikan informasi yang disebarakan terpercaya bukan berita *hoaks*.

Junico menyatakan bahwa keberadaan media seperti RRI memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya informasi yang akurat dan kredibel, terutama di tengah maraknya penyebaran berita palsu di era media baru yang mengutamakan kecepatan ketimbang keakuratan berita seperti saat ini.

"Bahwa RRI ini harus bisa lebih selektif lagi mengerjakan hal-hal sebagai media pemersatu bangsa, dengan memastikan informasi yang disebarakan bukan *hoaks*. RRI tidak perlu buru-buru soal pemberitaan karena kalau di pemberitaan online yang lain cepat itu adalah jawaban. Tetapi untuk RRI menurut saya

“

Bahwa RRI ini harus bisa lebih selektif lagi mengerjakan hal-hal sebagai media pemersatu bangsa, dengan memastikan informasi yang disebarakan bukan *hoaks*.

Junico Siahaan
Anggota Komisi I DPR RI



FOTO: SHANE/NR

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi I ke Serang, Banten, Jumat (22/3/2024).

utamakan kepercayaan publik dengan menyediakan informasi yang valid," ujar Junico dalam kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke RRI Bandung, Rabu (8/2/2024) lampau.

Legislator PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks. Menurutnya, RRI Bandung sebagai salah satu media yang memiliki jangkauan luas di masyarakat, memiliki tanggung jawab besar.

"Yang paling penting adalah RRI sebagai media milik pemerintah dengan jangkauan yang luas harus tetap menjaga komitmennya dalam mengemban tanggung jawab besar memberikan informasi yang akurat dan kredibel, agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses demokrasi yang sehat," tutup Junico Siahaan.

Serang Menjadi *Smart City*

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini, mengapresiasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mendukung transformasi Kota Serang menjadi Smart City. Hal ini diungkapkan dalam kunjungan kerja Komisi I ke Serang, Banten, yang bertujuan memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan smart city tersebut. Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah masalah data kependudukan.

"Saya dari Komisi I umumnya dan khususnya yang dari Dapil Banten II ini berterima kasih kepada Kominfo yang telah memilih Kota Serang sebagai salah satu kota yang menjadi objek program smart city ini. Nah, kita Komisi I ingin melihat apa tantangannya, apa hambatannya," ujar Jazuli kepada Parlemenaria

usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi I ke Serang, Banten, Jumat (22/3/2024) lalu.

Kominfo memperkenalkan konsep Digital ID yang berpotensi berdampak pada penggunaan e-KTP yang diterbitkan oleh Kemendagri. Meskipun demikian, Jazuli menyatakan kesiapannya melakukan koordinasi lintas komisi guna mempercepat penyelesaian hambatan tersebut.

Dengan pembangunan smart city, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan secara efisien, sehingga mempercepat kesejahteraan masyarakat. Komisi I pun berharap agar pembangunan Kota Serang sebagai smart city mendapat dukungan yang cukup, mengingat dampak positif yang diharapkan dari integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kota tersebut. [syn,bif/mh](#)

Komisi II Beri Perhatian Pada Seleksi CASN

Tahun ini seleski penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) banyak digelar di hampir semua kota di Indonesia. Komisi II DPR RI memberi perhatian serius atas hal ini. Aduan masyarakat atas kecurangan penerimaan CASN disampaikan ke beberapa pemerintah daerah.



FOTO: WILGA/NR

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin kunjungan kerja spesifik di Palembang, Rabu (6/3/2024).

DI Palembang, Sumatera Selatan, delegasi Komisi II DPR menerima banyak sekali aduan dalam seleksi CASN tahun 2023 lalu. Di Kantor Regional VII BKN Palembang, Komisi II pun menggelar pertemuan bertajuk Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, banyak keluhan masyarakat menghadapi seleksi CASN tahun lalu. Transparansi penerimaan jadi keniscayaan untuk terus dilakukan oleh Pemda.

Doli mengungkapkan, bayak praktik transaksional yang telah

terjadi, Menteri PAN RB sendiri sudah berkomitmen memastikan hal tersebut tidak terjadi dengan memperketat proses penerimaan, baik secara sistem maupun sanksi bagi oknum yang terbukti melakukan praktik kecurangan selama seleksi. "Nah, tapi rasa-rasanya kalau aspirasi masyarakat masih ada terdengar (kecurangan) yang seperti itu. Ini yang kami mau dalam," ujar Doli di Palembang, RAbu (6/3) lalu.

Komisi II sendiri, lanjut politisi Partai Golkar itu, sering membentuk Panja untuk membahas hal-hal spesifik seperti ini. Dulu pernah ada Panja Pengawasan penerimaan CPNS. Dalam kesempatan yang sama,

Kepala Kanreg VII BKN Palembang Margi Prayitno mengatakan, terkait temuan-temuan yang ada, pihaknya akan melakukan koordinasi. "Bila ditemukan permasalahan, kita bentuk tim untuk mencari solusi atas permasalahan, termasuk dilaporkan ke atasan untuk mendapatkan solusi terbaik," pungkasnya.

Begitu juga di Yogyakarta, delegasi Komisi II dipimpin Syamsurizal menyorot soal seleksi CASN dengan mendatangi Kantor Regional (Kanreg) I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Rabu (6/4) silam. Syamsurizal menegaskan kembali, perlunya pemerintah menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan jumlah formasi yang diminta oleh daerah dengan formasi yang diterima.

"Kami juga mempertanyakan alasan mengapa kasus perijokian masih terjadi. Sebagaimana telah diketahui bahwa perijokian ternyata telah terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Lampung," ujar politisi Fraksi PPP tersebut kepada **Parlementaria**. Ia menekankan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu dan paruh waktu juga jadi persoalan yang harus segera dituntaskan sebelum Desember 2024.

Ada sekitar 2,3 juta tenaga honorer di tanah air yang harus diselesaikan di akhir Pemerintahan

2023"



FOTO: RIDWAN/NR

“

Kami juga mempertanyakan alasan mengapa kasus perjokian masih terjadi. Sebagaimana telah diketahui bahwa perjokian ternyata telah terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Lampung,

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi II DPR RI ke Kantor Regional (Kanreg) I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Rabu (6/4/2024).

Presiden Joko Widodo kelak. Menanggapi hal itu, Kepala Kanreg I BKN Paulus Dwi Laksono menjelaskan bahwa kasus perjokian tidak terjadi di wilayah tugas Kantor Regional I BKN, yang meliputi DIY dan Jawa Tengah. Agar perjokian tidak terjadi, tambahnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebenarnya telah menyediakan fasilitas teknologi pengenalan wajah (*face recognition*).

"Di mana *face recognition* dilakukan dalam dua tahap, yakni ketika peserta tes akan masuk ruangan, dan manakala peserta membuka personal computer (PC)," jelas Paulus. Lebih dari itu, Paulus menuturkan bahwa panitia seleksi juga telah menyiapkan peralatan *make up* untuk para peserta perempuan. Oleh karena, kadang *make up* juga menyebabkan gagalnya *face recognition*.

Terkait belum sinkronnya kebutuhan jumlah formasi antara pusat dan daerah, BKN menjelaskan bahwa sebenarnya telah ada sistem teknologi informasi yang menyediakan layanan untuk memudahkan pengajuan formasi

antarinstansi, yakni melalui situs SIASN Integrasi. Namun, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan kembali. Hal itu agar peristiwa tertundanya pendaftaran penerimaan CASN 2023 yang telah lalu karena persoalan verifikasi dan validasi tidak terulang.

Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Junimart Girsang mendorong Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan dalam proses seleksi CASN khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dihapuskan. Ia menilai tes tersebut menjadi penghambat objektivitas dalam proses lulusnya seseorang menjadi ASN.

"Contoh misalnya saat seseorang mengikuti ujian dari pusat dan lulus, lalu ada SKT Tambahan yang dikeluarkan oleh daerah dan dengan SKT Tambahan menjadi tidak lolos. Ini mengarah kepada transaksional," ungkap Junimart usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional II BKN Surabaya, Rabu (6/3) lalu.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan, telah mendapatkan informasi transaksional kelulusan ASN di daerah dan telah diproses oleh kepolisian. Oleh karenanya, proses seleksi hanya menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) tanpa tes tambahan menjadi lebih efektif. "Kita harapkan tes penyaringan untuk CASN betul-betul bersih, termasuk SDM yang melakukan tes tersebut harus bersih, dan teknologi yang digunakan untuk tes tersebut juga harus bersih," imbuhnya. [we,rdn,uf/mh](#)



FOTO: UBAD/NR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional II BKN Surabaya.

Anggaran BNN Provinsi Perlu Ditambah

Badan Narkotika Nasional (BNN) di berbagai provinsi sempat mendapat pengurangan anggaran. Di Banten, misalnya, adalah salah satu BNN provinsi yang mendapat pengurangan anggaran. Kini, Komisi III DPR RI yang bermitra dengan BNN berkomitmen meningkatkan kembali anggaran BNN di semua provinsi.

Pengurangan anggaran yang diterima Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly. Menurutnya, masalah penyalahgunaan narkoba adalah isu serius yang memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, Komisi III DPR RI akan memperjuangkan dukungan anggaran untuk BNNP Banten.

"Anggaran itu tidak boleh dikurangi. Kita tadi mendengar kepada ketua pengadilan bahwa masalah narkoba yang tertinggi kejahatannya di Banten daripada beberapa kejahatan lain, sehingga itu tidak mungkin dipotong anggarannya. Nanti akan kami sampaikan dalam rapat dengan kepala BNN mengenai ini," ujarnya saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III



FOTO: ANDRI/NR

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Banten, Kakanwil Kumham, Kejaksaan Tinggi dan BNN Provinsi Banten.



BNN mesti dilengkapi personel maupun anggaran. Jadi, bila angka kejahatan itu tinggi, maka yang mesti diperkuat keuangan dan personil. Kejahatan narkoba itu cukup tinggi dan luar biasa.

Jacki Uly
Anggota Komisi III DPR RI

DPR RI dengan Kapolda Banten, Kakanwil Kumham, Kejaksaan Tinggi, dan BNN Provinsi Banten, di Tangerang, Banten, Senin (4/3) silam.

Lebih lanjut, Jacki menerangkan secara geografis, Banten memiliki pelabuhan yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Jawa. Dari Sumatra itu, narkoba dikirim melalui kapal menuju



Penanggulangan kasus-kasus narkoba oleh BNN belum luar biasa. Padahal kasus-kasus narkoba adalah kejahatan luar biasa. Untuk itu, pihaknya kembali menegaskan, BNN harus sangar atau bubar saja.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Manado.



FOTO: CHASBI/ANR

perusahaan yang ada di Banten ini. "Kontainer bisa isinya lain dan sebagainya. Itu cara agar mereka mengembangkan penyebaran narkoba. Jadi, diperlukan kegiatan yang terintegrasi dalam masalah penanganan narkoba," ujar politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Di sisi lain, Jacky menilai, BNN mesti dilengkapi personel maupun anggaran. Jadi, bila angka kejahatan itu tinggi, maka yang mesti diperkuat keuangan dan personil. Kejahatan narkoba itu cukup tinggi dan luar biasa, ujar Mantan Kapolda NTT ini. Jacki mengatakan, selama ini penanganan kasus narkoba belum efektif. Hal itu ditunjukkan dengan masih masifnya laporan kasus narkoba yang besar-besar.

Sementara di Manado, Sulawesi Utara, Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan mendesak agar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara sangar dalam pemberantasan narkoba. Indonesia sudah menandatangani

ratifikasi penanggulangan narkoba tingkat dunia.

"Saya tulis bukunya, *BNN: Bubar atau Sangar*. Kalau tidak mau bubar maka tangkaplah itu jaringan narkoba. Tetapi jika tidak mau sangar, saya minta dibubarkan saja," kata Hinca saat diwawancarai **Parlementaria** di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi III ke Manado, Sulut, Rabu (28/2) lampau.

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menilai, penanggulangan kasus-kasus narkoba oleh BNN belum luar biasa. Padahal kasus-kasus narkoba adalah kejahatan luar biasa. Untuk itu, pihaknya kembali menegaskan, BNN harus sangar atau bubar saja.

"Nah kalau tanya saya, pilih mana bubar atau sangar? Ya sangar, karena itu merupakan kewajiban Indonesia memerangi narkoba dan saya minta kepada BNN ada terobosan besar untuk

penanggulangan narkoba ini," tegas Hinca.

Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara III itu mengatakan, BNN adalah *leading sector* dalam pemberantasan jaringan narkoba di Tanah Air. Soal penambahan anggaran akan diperjuangkan oleh Komisi III DPR. Karena itu, ia pun mengajak BNN agar membuat permintaan anggaran yang besar untuk memberantas narkoba ini.

Di kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Sulut, Pitra A. Ratulangi mengungkapkan terima kasihnya. Dengan kehadiran Komisi III DPR ke Sulut ini dianggap mampu memberikan semangat baru dalam penanggulangan narkoba.

"Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan. Semoga ke depan anggaran kami dapat bertambah untuk dapat membuat terobosan baru," kata Pitra. man,cas/mh

Kenaikan Harga Beras Bikin Resah

Jelang dan selama Ramadan, harga beras meroket. Bahkan, beras-beras kemasan bermerk sempat menghilang dari supermarket. Masyarakat tentu resah, beras menghilang. Kalau pun ada, harganya meroket tajam.

Menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat atas kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Pasar Way Halim, Kota Bandar Lampung. Dipimpin langsung Ketua Komisi IV Sudin, pedagang beras diajak berinteraksi dan menyampaikan keluhan kesahnya. Pada kunjungan ini, otoritas Bulog ikut serta dalam peninjauan lapangan.

"Banyak ibu-ibu mengeluh harga beras mahal, harga telur naik mencapai 31.000, ayam juga naik. Maka kunjungan kami kali ini membawa Bulog, membawa badan pangan, membawa ID Food, bagaimana supaya nanti segera didistribusikan terutama beras," kata Sudin saat ditemui wartawan sesuai melakukan peninjauan, Kamis (7/3) silam.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini telah tersedia beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang terdistribusi



FOTO: UCHA/NIR

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat melakukan peninjauan ke Pasar Way Halim, Kota Bandar Lampung pada Kamis (7/3/2024).

di toko-toko beras. Beras program pemerintah tersebut memiliki harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan berdasarkan zona edar. "Tadi ada SPHP, berasnya bagus, *broken*-nya

tegas asal informasi tersebut valid. Selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan pencabutan izin jual beras SPHP sekaligus menghentikan pasokannya.

“

Banyak ibu-ibu mengeluh harga beras mahal, harga telur naik mencapai 31.000, ayam juga naik. Maka kunjungan kami kali ini membawa Bulog, membawa badan pangan, membawa ID Food, bagaimana supaya nanti segera didistribusikan terutama beras

Sudin
Ketua Komisi IV DPR RI

"Kasih tau saya tempatnya di mana. Nanti saya panggil Bulog Lampung, suruh panggil, jangan berikan lagi jatahnya. Tapi harus valid, jangan cuma katanya," tegasnya.

Penyaluran beras SPHP dilakukan dalam kemasan curah 5 kg dengan HET yang beragam berdasarkan 3 zona harga. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi seharga Rp10.900 per kg. Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, sebesar Rp11.500 per kg. Zona 3 meliputi Maluku dan Papua senilai Rp11.800 per kg.

Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, delegasi Komisi IV dipimpin Budhy Setiawan mengunjungi gudang Bulog Ciwangi untuk mencari tahu kenaikan harga

beras. Budhy mengimnau Bulog merespon cepat atas fenomena kenaikan ini.

"Ternyata memang gudangnya siap dan juga kami ingin melihat penyaluran stok tersebut yang akan dilakukan. Ternyata ini sudah ada jadwal penyalurannya dan kita berharap aksi cepat tanggap meredam kenaikan harga beras ini bisa lebih banyak dilakukan di banyak daerah," ujar Budhy di gudang BULOG Ciwangi, Purwakarta, Kamis (7/3) silam.

Wakil Ketua Komisi IV ini menyayangkan, angka importasi beras masih tinggi di tengah tingginya harga beras. Angka importasi tahun 2023-2024 mencapai 3.681.543 ton berdasarkan laporan Bulog. Budhy berharap, penyediaan

beras Bulog jangan bergantung pada impor. Budhy mengatakan, salah satu cara mengendalikan harga pangan adalah dengan membantu Bulog untuk meningkatkan fleksibilitasnya dalam penyerapan gabah petani lokal melalui regulasi yang bisa lebih disesuaikan.

"Harapan BULOG bisa mengendalikan harga pangan ini tidak lain dari bagaimana kita bisa membantu Bulog untuk melakukan peningkatan penyerapan gabah dari petani. Tentu ada regulasi yang mengatur ini dan tentu juga ada aturan kelembagaannya, kita ingin melihat lebih dalam lagi nanti ada perubahan-perubahan peraturan yang bisa dilakukan agar Bulog bisa lebih fleksibel bisa lebih banyak juga menyerap gabah lokal, gabah petani," tuturnya.  uc,yas/mh



FOTO: YASMIN/ANR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, saat meninjau gudang BULOG Ciwangi di Purwakarta, Jawa Barat (7/3/2024).

Membenahi Transportasi Laut

Transportasi laut jadi alternatif moda yang efektif selain moda transportasi darat dan udara. Saat moda transportasi udara dan darat padat, para pelancong mencari alternatif moda di laut. Sebagai moda alternatif tentu perlu pembenahan, tidak saja armadanya tapi juga infrastruktur dermaganya.



FOTO: MENTARI/NR

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Kunker Reses Komisi V DPR RI ke Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024).

Saat delegasi Komisi V DPR RI berkunjung ke Denpasar, Bali, isu pembenahan transportasi laut jadi perbincangan.

Pengembangan transportasi laut jadi keniscayaan untuk segera diwujudkan. Kapal-kapal feri yang menjadi salah satu armada laut, perlu dikembangkan lebih lanjut. Seperti di Hongkong, kapal-kapal feri pengangkut penumpang sangat canggih dan memadai.

Ketua Komisi V DPR Lasarus yang memimpin pertemuan dengan otoritas Kementerian Perhubungan di Denpasar, Senin (4/3) silam, menyerukan, pengembangan sistem

transportasi laut, melalui kapal-kapal feri di beberapa dermaga yang dimiliki Dirjen Kelautan Kementerian Perhubungan. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut. Wisatawan domestik maupun mancanegara akan nayah bertransportasi laut bila armadanya memadai.

Tentu perlu dibuat standarisasi armada laut oleh Kemenhub seperti kapal-kapal penumpang dan feri yang mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keamanan. Dengan begitu, kelak moda transportasi laut tidak saja jadi alternatif, bahkan menjadi yang utama.

"Kalau kita mungkin kembangkan seperti di Hongkong, ya kapal feri yang standarnya bagus untuk menghubungkan antara pantai di Bali ini. Tidak perlu lagi lewat darat, orang bisa menjangkaunya melalui laut tentu dengan kapal yang aman dan nyaman kalau jarak tempuhnya cuma sedikit," jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sebab, menurutnya, dengan transportasi laut yang masif, wisatawan akan mudah terhubung ke Teluk Benoa dari beberapa dermaga. Sehingga, penataan terhadap kenyamanan dan keamanan kapal-kapal feri, baik

yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri harus dilakukan oleh Kemenhub.

Gelanggang Inovasi

Di Yogyakarta, delegasi Komisi V DPR RI berkunjung ke Universitas Gajah Mada (UGM) untuk meninjau pembangunan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) yang sedang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diharapkan, pembangunan GIK UGM tersebut bisa bermanfaat optimal bagi para sivitas akademika kampus.

Anggota Komisi V DPR Sudewo yang ikut dalam kunjungan ini mengatakan, "Saya harap UGM mampu melakukan pengelolaan, supaya GIK ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Betul-betul memberikan peran dan manfaat bagi sivitas akademika di Indonesia," ujarnya kepada **Parlementaria** dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V ke Sleman, DIY, Senin (4/3) silam.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengapresiasi keberadaan GIK. Menurutnya, GIK adalah satu infrastruktur yang penting bagi dunia pendidikan tinggi untuk merespon perkembangan zaman. Lewat GIK, kata Sudewo, UGM sudah siap mendunia. GIK ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di internal UGM, tapi untuk masyarakat umum. Dengan demikian, UGM bisa menciptakan tenaga kerja yang andal bagi Indonesia.

Selain GIK, Kementerian PUPR juga membangun rumah susun (rusun) untuk tempat tinggal dosen UGM. Dan Komisi V telah meninjau rusun tersebut. Sudewo pun turut mengapresiasi pembangunan rusun. Menurutnya, kualitas bangunan rusun sudah cukup baik. Ia pun berharap, pembangunan rusun seperti ini dibangun juga di kampus-kampus lain.

"Saya mendorong Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Perumahan untuk dilakukan juga (pembangunan rusun) di perguruan tinggi yang lain," ujarnya. Sebagai informasi, GIK saat ini sedang dalam proses pembangunan. Proyek ini menelan anggaran lebih dari setengah triliun rupiah. Progres fisiknya saat ini sudah mencapai 96 persen dan ditargetkan selesai pada April 2024.

Kawasan GIK UGM terdiri dari delapan zona yang dirancang sebagai sarana penguatan sumber daya manusia (SDM) sekaligus berfungsi sebagai fasilitas kemahasiswaan dari berbagai fakultas. Sementara rusun tempat tinggal para dosen UGM memiliki enam lantai dengan 88 unit hunian. Berlokasi di Gang Kinanti Berek, Kocora, Sinduadi Mlati Sleman, Kementerian PUPR menerapkan *Building Information Management* (BIM) dan konsep bangunan hijau untuk rusun tersebut. — **mri,ndn/mh**



FOTO: MADHEN/NR

Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo saat meninjau pembangunan rusun untuk tempat tinggal dosen UGM dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi V ke Sleman, Provinsi DIY, Senin (04/03/2024).

Bandara Kertajati Masih Sepi Pengunjung

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, mendapat sorotan. Setelah lama beroperasi, pengunjung ke bandara ini. Padahal, bandara ini didesain untuk banyak pesawat, termasuk pesawat Antonov, pesawat jumbo di dunia.



Foto: Devi/nr

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron saat meninjau fasilitas Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

Delegasi Komisi VI DPR RI dipimpin Herman Khaeron meninjau langsung bandara ini untuk melihat kondisi terkini. Herman sempat bertanya-tanya, akan seperti apa bandara ini, karena angka kunjungan penumpang dari Kertajati tetap sepi. Rata-rata kunjungan per hari 1500 orang. Meski sudah dibuka jalur penerbangan ke beberapa kota di Tanah Air, namun tetap

saja tidak mendongkark angka pengunjung.

"Hal ini menjadi pembahasan penting tadi dengan Garuda Indonesia, Angkasa Pura, Air Nav, dan Pimpinan Bandara Kertajati. Esensinya adalah ini akan diapakan ke depannya dengan keterbatasan-keterbatasan kunjungan penumpang yang rata-rata per hari 1500 orang, meski sudah dibuka rute-rute yang potensial ke Kalimantan Timur, Balikpapan, Bali, dan bahkan dalam seminggu ada dua

kali angkutan umroh melalui Kuala Lumpur," ungkap Herman di Kertajati, Majalengka, Senin (19/2) lampau.

Menurutnya, bandara ini sangat strategis untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Herman mensinyalir, mungkin Bandara Kertajati kurang sosialisasi sebagai bandara alternatif di Jawa Barat. Politisi Partai Demokrat lalu mengusulkan, agar Kertajati jadi penerbangan umroh dan haji.

"Namun demikian selalu ada masalah, pertama tentu terkait dengan harga avtur. Dimana harga avtur di sini lebih mahal daripada harga avtur di Cengkareng. Padahal, avtur sebetulnya lebih dekat kalau secara transportasi. Karena

“

Bandara ini sangat strategis untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Herman mensinyalir, mungkin Bandara Kertajati kurang sosialisasi sebagai bandara alternatif di Jawa Barat.

“

Tiap pekan atau bulan harus ada operasi pasar yang memantau ketersediaan pangan di setiap pasar-pasar.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji.



dari Balongan ke sini jauh lebih dekat. Namun, mungkin karena penggunaannya lebih sedikit dibandingkan dengan Cengkareng, sehingga di sini lebih mahal,” kata legislator dapil Jabar VIII.

Dengan lebih mahal dan tingginya harga avtur tersebut, lanjutnya, maka sangat berpengaruh terhadap harga tiket. “Nah, kalau kemudian berpengaruh terhadap tiket pesawat sebagai instrumen untuk menggunakan transportasi udara, saya kira ini harus menjadi bahan pertimbangan ke depannya bahwa Pertamina harus memberikan harga yang sama. Sehingga, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap samanya harga tiket di seluruh bandara yang ada,” ucapnya.

Tinjau Pasar

Delegasi Komisi VI lainnya meninjau pasar di Jawa Timur menyusul kelangkaan beras premium. Sejumlah pedagang sempat mempertanyakan, mengapa beras premium menghilang. Bahkan, di toko ritel modern yang biasanya melimpah, malah tak ada sama sekali. Harganya juga terus meroket. Kondisi ini sangat memberatkan pedagang dan pembeli sekaligus.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, kelangkaan dapat terjadi karena fenomena el nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai. Jika itu disebabkan el nino, maka menurut Sarmuji persoalannya bakal lebih rumit karena dampak yang dirasakan akan memengaruhi masa tanam dan juga masa panen. Namun, jika produksi beras terbukti kurang, maka jalan satu-satunya ialah mengimpor beras.

Meski demikian, Sarmuji mengingatkan untuk tidak merugikan petani lokal, impor jangan dilakukan pada masa panen. “Saya menyarankan agar kelangkaan ini bisa teratasi satu-satunya jalan harus impor, kita tidak mungkin membiarkan masyarakat mengalami kekurangan ketersediaan pangan yang menjadi bahan pokok utama. Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen. Jadi tidak merugikan petani,” ujarnya di Jawa Timur, Senin (19/2) lampau.

Lanjut politisi Partai Golkar ini, pemerintah harus fleksibel terhadap penyesuaian harga beras di pasaran. Ia mengimbau, jangan sampai petani yang memproduksi dipatok dengan harga eceran tinggi, malah menahan angka produksi. “Situasi

tersebut akan berdampak adanya penimbunan dalam gudang, karena tidak adanya kejelasan. Kenaikan harga akan terjadi karena langkanya stok beras,” jelasnya.

Di sisi lain, Sarmuji mengatakan sesuai apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi bahwa banjeri pasar-pasar yang ada dengan produk-produk pangan. “Dengan demikian tiap pekan atau bulan harus ada operasi pasar yang memantau ketersediaan pangan di setiap pasar-pasar. Sehingga, kelangkaan pangan bisa teratasi dengan sistem seperti itu,” katanya.

Adapun menurut Bulog, realisasi impor beras tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan dan stabilitas harga mencapai 507.000 ton. Perusahaan negara itu mengakui bahwa saat ini tidak dapat menyerap beras lokal karena harga gabah sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Diketahui, Bulog mendapatkan penugasan impor sebanyak 2,5 juta ton pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 500.000 ton merupakan penugasan lanjutan dari tahun 2023 dan 2 juta sisanya merupakan penugasan impor khusus tahu 2024.

dep, rni/mh

Selama Ramadan Kebutuhan Energi Harus Terjaga

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari saat mengikuti kunjungan Komisi VII DPR ke Bali, berharap pelayanan PT Pertamina dapat menyentuh hingga seluruh daerah di Indonesia. Pelayanan tersebut harus lebih inovat kepada konsumen, bahkan hingga menyentuh daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Masih ada daerah 3T yang belum tersentuh program Pertamina secara maksimal, ditambah strategi dan program dari Pertamina yang masih sama digunakan setiap tahunnya. Pertamina harus menyisihkan sebagian keuntungannya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ucap Ratna di Bali, Kamis (7/3) lalu.

Ratna berharap Pertamina dapat terus berinovasi dalam mencegah penyelewengan BBM bersubsidi melalui upaya digitalisasi di setiap SPBU. "Jika hal tersebut konsisten dilakukan maka dapat mendukung ketersediaan BBM di sepanjang Ramadan dan Idulitri," harap politisi Fraksi PKB ini.

Di sisi lain, Ratna juga berharap Pertamina memberikan layanan-layanan tambahannya di daerah 3T. Menurutnya, terlihat selama ini fokus Pertamina hanya ada di kota-kota besar, sementara di daerah 3T yang menjadi tujuan pemudik kurang tersentuh. Karena itu, tegasnya, Pertamina harus bisa memperhatikan layanan-layanan tambahan tersebut.

"Seperti adanya motor keliling yang menyuplai BBM, membantu jika ada kendaraan bermotor yang bermasalah dan juga bisa

Jelang dan selama Ramadan, kebutuhan energi selalu meningkat seperti juga kebutuhan pangan. Kebutuhan energi ini harusw bisa diakses pula di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar). PT. Pertamina yang bertanggung jawab atas persoalan ini diserukan bersiap diri memenuhi semua kebutuhan energi.



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari saat mengikuti rapat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR dengan Pertamina Patra Niaga, di Bali, Kamis (7/3/2023).

menjangkau ke daerah-daerah 3T, meskipun kami tahu itu membutuhkan energi yang luar biasa. Tapi saya yakin Pertamina mampu dalam hal itu," jelasnya.

Emisi Karbon

Masih di Bali, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyerukan Pemerintah Indonesia mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global. Salah satu



FOTO: FARHAN/NR

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto saat bertukar cenderamata usai pertemuan di Denpasar, Bali, Kamis, (7/3/2024).

upaya menaikkan target *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO₂ pada tahun 2030. Demi mencapai *net zero emissions* pada tahun 2060 atau lebih awal.

PT PLN telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid Nusa Penida dengan harapan dapat membangun sebuah transisi energi, yakni Energi Baru Terbarukan (EBET) khususnya di Provinsi Bali.

Pada Kunjungan Kerja kali ini, Sugeng berharap, langkah PT PLN Provinsi Bali yang telah membangun PLTS Hybrid Nusa Penida bisa memulai sedikit demi sedikit upaya menekan emisi bahan bakar fosil yang sangat besar.

"PLTS Nusa Penida mempunyai 3,5 MWac, ini adalah sebuah langkah awal dan strategis bagi transisi energi yang diwujudkan dengan

“

PT PLN telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid Nusa Penida dengan harapan dapat membangun sebuah transisi energi.

membangun PLTS yang berada di pulau Nusa Penida, dan memperoleh pengalaman empirik dimana mengganti energi fosil dengan energi baru sehingga bisa ditingkatkan untuk cakupan yang lebih luas lagi," ujar Sugeng, Kamis (7/3) lalu..

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mempertanyakan Kementerian ESDM yang didukung PLN mengenai rasio elektrifikasi. Tingkat elektrifikasi di Indonesia sebesar 99,54%, tetapi masih banyak desa yang belum mendapatkan sumber daya listrik. Komisi VII DPR mencoba mencocokkan data kembali agar ke depan dapat menerapkan EBET di seluruh Indonesia.

"Tingkat elektrifikasi kita sudah mencapai 99,54% hanya tinggal kurang lebih 0,46% saja yang kurang. Kurang lebih 450 ribu rumah tangga yang belum teraliri listrik, tetapi faktanya banyak masyarakat di desa-desa yang belum mendapatkan langsung sambungan listrik. Maka dari itu kita harus mencocokkan kembali data-datanya dengan PT PLN supaya jaringan listrik dapat menjangkau desa-desa terjauh sekalipun," tutupnya. — afr,mf/mh

Menghadirkan Penyelenggaraan Haji Ramah Lansia



FOTO: TALIFAN/IR

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat bertukar cenderamata di sela-sela Kunspek (Kunjungan Spesifik) Tim Komisi VIII DPR RI di Kantor Walikota Tangerang, Kamis (14/3/2024).

Musim haji 2024 terus diupayakan kian ramah pada calon jemaah haji lansia. Strategi mitigasi atas upaya ini terus dilakukan. Komisi VIII DPR RI berkepentingan atas penyelenggaraan haji yang ramah lansia ini

Pada kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Tangerang, Banten, delegasi Komisi VIII dipimpin Ashabul Kahfi mendukung sepenuhnya mitigasi Kementerian Agama untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang ramah lansia. "Komisi VIII DPR RI mendukung sepenuhnya strategi

mitigasi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji ramah lansia," ujar Ashabul, Kamis (14/3) lalu.

Setidaknya ada empat strategi menuju haji ramah lansia. Pertama, melakukan *screening* kesehatan sebagai syarat pelunasan. Kedua, memberikan kesempatan pelunasan bagi pendamping jemaah lansia pada pelunasan tahap dua. Ketiga,

“

Bagi jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas yang memerlukan pendamping, kami bantu ajukan pendampingnya

menyediakan fasilitas ramah lansia sejak di dalam negeri sampai dengan di Arab Saudi. Keempat, menyiapkan sajian atau menu khusus bagi jemaah haji lansia, serta petugas khusus yang melayani lansia.

Pemerintah Kota Tangerang sendiri mendukung upaya Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2024 ramah lansia. Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, akan membantu jemaah haji lansia dalam mengajukan pendamping, serta mengedukasi jemaah untuk saling tolong, terutama menolong dan membantu jemaah lansia.

“Bagi jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas yang memerlukan pendamping, kami bantu ajukan pendampingnya yang telah memiliki nomor porsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat melunasi Bipih pada tahap kedua,” kata Nurdin.

Bantuan Korban Banjir

Di Cirebon, Jawa Barat, delegasi Komisi VIII DPR menyalurkan bantuan sosial bagi para korban banjir. Bantuan disalurkan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. Selain kepada masyarakat, Komisi VIII beserta mitra juga memberikan bantuan penanganan mitigasi bencana di Kabupaten Cirebon, pada Kamis (14/3) silam.

Sebelumnya, bencana banjir menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu (6/3) lalu. Meluapnya air sungai Ciberes dan Cisanggarung tersebut disebabkan hujan dengan intensitas tinggi dan naiknya air laut di Kabupaten Cirebon. Akibatnya, sebanyak 9 kecamatan terdampak banjir.

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid mengatakan, bencana banjir di Kabupaten Cirebon yang terus berulang memerlukan keseriusan pemerintah dalam memitigasi

“

Pemerintah perlu menjalankan solusi yang mendasar dalam memitigasi bencana dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Cirebon, pada Kamis (14/3/2024).



FOTO: BIANCA/NR

bencana. Ia menyebut, pemerintah perlu menjalankan solusi yang mendasar dalam memitigasi bencana dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

“Nah, kalau ini bisa dilakukan satu kolaborasi, maka beragam hal yang tadi disebutkan, apakah bendungan, apakah embung termasuk lumpung sosial itu akan bisa diwujudkan,” ujarnya kepada Parlemen. Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, ketika terjadi bencana, selain bantuan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat terdampak, pemerintah perlu memiliki *roadmap* yang jelas dalam menangani permasalahan akibat bencana. Masalah sosial yang melingkupinya harus diatasi bersamaan dengan bencana alam yang rutin terjadi di Cirebon.

Lebih lanjut, Hidayat berharap, bantuan yang telah disalurkan

dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak serta menumbuhkan semangat dan motivasi untuk bangkit. “Untuk kemudian bisa menghadirkan semangat, menjadi solusi untuk bangkit. Kemudian bisa mengatasi permasalahan yang ada,” harap legislator Dapil DKI Jakarta II ini. Adapun bantuan yang diserahkan Komisi VIII dan mitra adalah bantuan PSKBA senilai Rp1.736.248.000, bantuan PKH (102.948) KPM Tahap 1 Rp48.090.634.324, Bantuan BBPPKS Bandung Rp95.689.500, Bantuan Seragam SD-SMA Sentra Phalartha Rp14.100.000, DSP Operasional Rp250.000.000, Bantuan logpal dari BNPB yang sudah diterima dan dicek bersama BPBD Kab. Cirebon dengan total nilai Rp1.484.034.050, serta bantuan tahap ke-2 yakni perahu karet dan sembako 100 paket. [tn,bia/mh](#)

Mengubah Strategi Penanganan Stunting



Foto: Anju/nr

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher, saat mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/02/2024).

Stunting masih menghantui pertumbuhan anak-anak Indonesia. Selalu ada kampanye penurunan stunting, tapi stunting masih tinggi angkanya. Perlu ada perubahan pendekatan mengatasi stunting. Bila selama ini “menurunkan” menjadi “mencegah” penambahan stunting baru.

Ditemui di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher mengatakan, ini strategi penting untuk mengatasi stunting di Indonesia. “Kita sudah sepakat bahwa diksi menurunkan stunting itu harus

diluruskan, diganti dengan mencegah penambahan stunting baru. Kenapa, karena menurunkan stunting ini ternyata tidak mudah,” ujar Netty di Bintan, Kepri, Rabu (28/2) silam.

Netty menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak adanya dukungan dari Badan

“

Tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam menangani masalah stunting dan memperkuat fungsi keluarga di Indonesia.

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Ini membuat keluarga yang memiliki balita stunting harus membeli PKMK secara mandiri. Ini beban tambahan bagi mereka.

“Sangat penting bagi kita untuk mengubah paradigma ini, karena menurunkan stunting ternyata tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya. Politisi PKS itu menyebut pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi keluarga. Menurutnya, banyak persoalan seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar dapat diatasi jika fungsi keluarga diperkuat dengan baik.

“Keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi anggotanya,” tuturnya. Legislator dapil Jawa Barat ini juga menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik dari kepala keluarga mengenai peran dan fungsi keluarga dalam memastikan kesejahteraan anggota keluarga, terutama soal asupan dan asuhan yang tepat.

Ia menyatakan, tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam menangani masalah stunting dan memperkuat fungsi keluarga di Indonesia. “Nah, hari ini yang juga menjadi tantangan tidak kalah penting adalah ternyata banyak keluarga kita, kepala keluarga kita, yang memang belum memahami fungsi keluarga dalam menyelenggarakan pola asupan dan asuhan keluarga,” tutupnya.

Sementara di Tanjung Pinang, Kepri, Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti mengatakan bahwa target menurunkan angka stunting di level 14% tahun ini merupakan



FOTO: AGUNG/NR

Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024).

“

target menurunkan angka stunting di level 14% tahun ini merupakan tugas bersama. Seluruh kementerian dan lembaga punya andil,

tugas bersama. Seluruh kementerian dan lembaga punya andil, sebab tugas menangkal kekurangan gizi pada anak itu punya pendekatan multisektor.

“Kami (Komisi IX) menekankan kepada seluruh kementerian dan lembaga, jadi bukan hanya BKKBN saja (leading), tapi seluruhnya dapat terlibat. Hal ini melibatkan banyak pihak dan kita harus semangat,” ujarnya ditemui usai kunjungan kerja

reses Komisi IX di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2) lalu.

Meskipun di masa depan ada rencana program makan gratis, legislator yang akrab disapa KD ini bilang, masyarakat juga berhak tahu apakah nilai nutrisi dari makanan tersebut sudah mencukupi kebutuhan anak-anak. Sejauh ini pihaknya selalu mendorong target pemerintah dengan mendorong sosialisasi di berbagai tempat.

Di Tanjungpinang, angka stunting berhasil turun tahun lalu. KD tetap optimistis penurunan stunting akan diikuti oleh banyak daerah, namun ia berharap klaim tersebut dapat dicek kembali. “Dalam banyak kunjungan kerja kami, memang pemerintah daerah selalu klaim (angka stunting) di bawah nasional. Ini tugas kami mengecek dengan detail. Tetapi kami optimis menyelesaikan di periode ini (pengawasan stunting),” urai politisi Fraksi PDI Perjuangan ini. — aas, aha/mh

Memajukan Sepak Bola Nasional

Sepak bola nasional terus mendapat sorotan. Prestasi cabang olahraga yang satu ini belum membanggakan publik di Tanah Air. Perlu mitigasi, mengurai benang kusut persepakbolaan nasional. Banyak masalah dan rintangan yang harus dihadapi bersama.

Ketika delegasi Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan otoritas olahraga di Denpasar, Bali, isu sepak bola nasional jadi sorotan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudiah yang memimpin pertemuan menyampaikan, Komisi X selalu mendukung pemerintah dan pelaku olahraga, khususnya sepak

bola, untuk mengurai satu-per satu permasalahannya.

Ia menyadari pengembangan sepak bola nasional telah sejak lama menghadapi banyak rintangan dalam mengembangkan kompetisi yang profesional. "Tugas pemerintah memfasilitasi, mendengarkan, dan mengakomodasi masukan-masukan dari para penggiat olahraga, baik itu SDM, personil dan sarana prasarana,

maupun kebijakannya, karena pembiayaan itu tergantung pada kebijakannya," ungkap Hetifah di Kantor Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (14/3) lalu.

Cabang sepak bola pernah mengalami dualisme organisasi, dualisme kompetisi, dualisme timnas, 'sepak bola gajah' atau mafia sepakbola, gaji pemain tidak dibayar, PSSI dibekukan oleh pemerintah dan tahun 2015 sepakbola Indonesia dibekukan oleh FIFA. Belum lagi soal tawuran antarsuporter sering terjadi, dan berbagai peristiwa lainnya yang merintang pengembangan industri sepak bola.

Komisi X mendukung reformasi PSSI, mendukung penyelenggaraan



FOTO: EKO/NR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudiah saat memimpin Kunspek Komisi X DPR RI ke Bali.

FIFA World Cup U17 yang telah berlangsung sukses, dan perbaikan manajemen kompetisi liga sepak bola. Komisi X DPR selalu mendorong pemerintah mewujudkan sepak bola dengan menjalankan Inpres No.3/2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, agar prestasi sepak bola cepat terwujud.

Komisi X, lanjut Hetifah, tentu sangat mendukung upaya perbaikan infrastruktur stadion sepak bola yang sedang dikerjakan oleh KemenPUPR. Hal lain yang juga menjadi perhatian Komisi X dalam kunjungan ini adalah inovasi olahraga yang dikembangkan di tingkat desa. Ada wadah untuk menemukan bibit-bibit muda di bidang olahraga. Komisi X berharap, pemerintah baik pusat atau daerah bisa terlibat dalam pengembangan olahraga di tingkat desa.

"Kami juga mendiskusikan hal lain bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa terlibat," ujar Hetifah. Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu, berpandangan bahwa industri sepak bola bisa menjadi wahana wisata bagi siapa pun yang menyaksikan pertandingannya. Turnamen-tournament sepeka bola di dalam negeri harusnya bisa mendatangkan klub-klub sepak bola internasional. Di Bali, misalnya, pertandingan sepak bola bisa jadi alternatif wisata bagi para pelancong lokal dan internasional.

Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, delegasi Komisi X DPR juga bicara soal standar stadion sepak bola bertaraf internasional sesuai regulasi FIFA. Stadion standar FIFA penting diwujudkan untuk menghadapi situasi darurat seperti kerusakan dan kebakaran.

"Misalnya pintu akses evakuasi ini, ingin memastikan apakah sudah disiapkan. Tapi, pelaksanaannya memang masih perlu kita lihat. Misalnya, mobil ambulans bisa masuk kemudian mobil pemadam kebakaran juga bisa masuk. Kemudian proses



FOTO: UJE/INR

Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/3/2024).

“

Komisi X mendukung reformasi PSSI, mendukung penyelenggaraan FIFA World Cup U17 yang telah berlangsung sukses, dan perbaikan manajemen kompetisi liga sepak bola.

dengan pintu masuk yang ada itu bisa diukur berapa jumlah penonton yang bisa masuk dalam waktu tertentu," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/3) lalu.

Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan even internasional menjadi bukti konkret bahwa investasi dalam pembangunan stadion yang memenuhi standar FIFA memiliki dampak positif yang signifikan. Selain memberikan sarana yang

representatif untuk pertandingan olahraga, stadion yang memadai juga mampu menarik even internasional yang besar dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.

"Saya membayangkan dengan even internasional pertama kali yang mengundang penonton dalam jumlah yang luar biasa dan itu dua kali lipat dari kapasitas setelah direnovasi. Nah, ini tentu harus dilakukan langkah-langkah antisipasi antara lain memberikan sarana layar lebar di luar stadion dalam jumlah yang cukup, sehingga kemudian bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan penonton yang memaksakan diri," ujarnya.

Zainuddin berharap, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat memantau dan mengawasi proses renovasi stadion dengan cermat, sehingga Stadion Delta Sidoarjo dapat menjadi simbol kebangkitan olahraga di Indonesia. Langkah-langkah antisipasi juga diperlukan, seperti menyediakan layar lebar di luar stadion untuk mengurangi tekanan penonton. [ssb, upi/mh](#)

Melihat Kebutuhan Pembiayaan di Bulan Ramadan

Kebutuhan pembiayaan selama Ramadan melonjak, seiring kebutuhan masyarakat yang ikut meroket. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, peningkatan terlihat dari tren data pembiayaan selama lima tahun terakhir yang selalu meningkat di satu bulan sebelum hari Raya Idulfitri.



FOTO: PUNTHO/NR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Amir Uskara saat memimpin pertemuan dengan OJK dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (14/3/2023).

Adapun pembiayaan paling besar disumbang oleh kredit kendaraan bermotor, untuk keperluan mudik atau berpergian selama libur lebaran. Selain sektor *multifinance*, OJK juga memperkirakan pembiayaan melalui platform 'Buy Now Pay Later' akan mengalami tren kenaikan utamanya untuk membeli kebutuhan Ramadan dan tiket mudik lebaran.

Fakta ini terungkap saat Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan OJK di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/3/) lalu. Wakil Ketua

Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat diwawancarai Parlemenaria usai acara menekankan, asas keseimbangan antara industri perusahaan pembiayaan tetap bisa survive dan di sisi lain masyarakat juga tetap terlindungi.

"Kami ingin yang pertama bagaimana industri ini tetap bisa survive, tapi juga masyarakatnya terlindungi. Kami tidak ingin masyarakat karena terdesak, kemudian mengambil, padahal tidak sesuai dengan kemampuan pengembalian. Ini semua kami jaga," ujar Amir.

Khususnya aspek kredit kendaraan bermotor, Amir memberi warning kepada perusahaan pembiayaan tetap berhati-hati dalam memberikan kredit agar pertumbuhan piutang tidak diiringi dengan kenaikan risiko kredit. Terlebih dengan regulasi yang ada saat ini, masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan cicilan dari Bank Indonesia (BI).

"Saya kira itu rutin menjelang lebaran biasanya ada (kendaraan bermotor, ini juga kita warning kepada industri untuk hati-hati karena bagaimanapun kendaraan bermotor saat ini dengan regulasi yang sangat mudah untuk mendapatkan dari BI ya. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber masalah buat pembiayaan," pesannya.

Namun demikian, ungkap Amir, Komisi XI secara garis besar mengapresiasi peran OJK dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya warga Bogor dan Jawa Barat agar memiliki pemahaman yang baik tentang produk layanan keuangan sehingga dapat menggunakan pembiayaan tersebut secara bijak.

"Sehingga kita bersama dengan OJK hari ini ingin melihat kondisi itu bagaimana di Bogor, Jawa Barat. Dan kami mendapatkan informasi dari seluruh asosiasi dan bahkan industri bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah dalam kontrol dan sesuai



FOTO: OJI/NR

Ketua Tim Kunspek Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat pertemuan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono beserta jajarannya di Kota Tangerang, Banten, Kamis (14/3/2024).

aturan yang ada di OJK," puji politisi Fraksi PPP ini.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman memproyeksikan terjadi kenaikan permintaan pembiayaan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk persiapan puasa dan lebaran, pembelian tiket mudik, serta pembelian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Hal ini juga dipicu semakin berkembangnya 'Buy Now Pay Later' yang dilakukan masyarakat melalui *e-commerce*. OJK memproyeksikan pada Maret 2024 pertumbuhan piutang pembiayaan berada pada kisaran 11% hingga 13%. Hal ini menunjukkan Ramadan memiliki dampak cukup signifikan dengan penyaluran pembiayaan perusahaan pembiayaan.

Inflasi Selama Ramadan

Sementara itu, delegasi Komisi XI DPR dipimpin Andreas Eddy Susetyo di Kota Tangerang, Banten, membincang inflasi selama Ramadan. Komisi XI mendengarkan langsung paparan strategi otoritas BI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada semester pertama tahun 2024 dalam menyikapi inflasi yang terjadi. Pada Ramadan dan menjelang Idulfitri 1445 Hijriyah selalu ada pergerakan inflasi.

"Komisi XI DPR RI mengharapkan berbagai strategi yang dilaksanakan BI bersama TPID mampu mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Banten maupun Kota Tangerang," ungkap Andreas saat pertemuan dengan Deputi

Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono beserta jajarannya di Kota Tangerang, Banten, Kamis (14/3) lalu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, tantangan dalam perekonomian saat ini terutama pada Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriyah adalah kenaikan inflasi pangan. BI yang salah satu kewenangannya adalah stabilisasi nilai rupiah tentu sangat relevan untuk berperan dalam menurunkan harga-harga yang merupakan aspirasi masyarakat.

"Upaya Bank Indonesia bersama TPID dalam mengendalikan inflasi sangat penting dalam menurunkan laju inflasi. Pengendalian inflasi tetap mengacu pada prinsip 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif," tandas legislator Dapil Jawa Timur V ini. — pun, oji/mh

Pemerintah Harus Kendalikan Harga Pangan

Harga bahan pangan pokok selama Ramadan mengalami lonjakan. Dari pantauan para legislator, kenaikan terjadi hampir di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi ini mendapat sorotan kuat dari DPR RI, sehingga mendorong pemerintah agar segera mengendalikan harga pangan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada minggu ketiga bulan Maret saja, harga beras medium sampai premium berada di kisaran Rp14.000 - 16.000 per kg. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung upaya pemerintah dalam stabilisasi harga beras.

"Pastinya, kami turut prihatin dan merasakan betul kegelisahan

masyarakat. Apalagi, saat ini kita sedang Ramadan, dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idulfitri. Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya menjaga stabilitas harga beras," ungkap Puteri.

Sebelumnya, pemerintah melalui Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) memang sudah membanjiri sejumlah pasar induk dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Termasuk menggelontorkan beras



FOTO: MUNCHEN/IR

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.

SPHP di Pasar Johar Karawang yang mencapai 200-300 ton per hari guna meredam dan menurunkan harga beras di pasaran.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, program SPHP ini juga perlu diawasi supaya pasokannya terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran kepada konsumen. Sebab laporan Ombudsman RI sebelumnya menyebut, jika pasokan beras SPHP Bulog berlebihan, maka ada dugaan dikemas kembali menjadi beras komersil, mengingot kualitasnya yang tidak jauh berbeda. "Kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Karenanya, kami harap hal ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah," ucap Puteri.

Di tengah kenaikan harga beras ini, pemerintah diketahui menambah porsi impor untuk pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan menyayangkan hal itu. Angka impor beras tahun 2023-2024 sejumlah 3.681.543 ton berdasarkan laporan BULOG saat Budhi melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta, Jawa Barat.

"Kalau bergantung dari impor kan ketika harga beras diimpor di pasar internasional juga sudah naik.



FOTO: YASMIN/IR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, saat meninjau gudang BULOG Ciwangi di Purwakarta, Jawa Barat (7/3/2024).

HARGA PANGAN 2024

Beras Medium:

Januari	Rp13.310/kg
Februari	Rp13.920/kg
Maret	Rp14.320/kg

Cabe Merah Keriting:

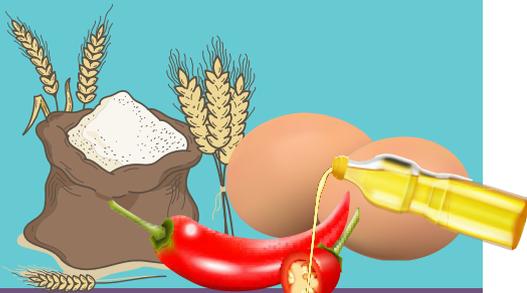
Januari	Rp50.210/kg
Februari	Rp57.570/kg
Maret	Rp62.200/kg

Telur Ayam Ras:

Januari	Rp28.070/kg
Februari	Rp28.900/kg
Maret	Rp31.590/kg

Minyak Goreng Kemasan:

Januari	Rp17.260/kg
Februari	Rp17.440/kg
Maret	Rp17.710/kg



sumber dari Bapenas per tanggal 21 Maret 2024

Kemudian juga ada kebijakan untuk menahan ekspor dari berasnya, maka kita akan kesulitan,” ujarnya.

Lebih lanjut, menanggapi permasalahan lonjakan harga beras di tanah air, Budhy mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengendalikan harga pangan adalah dengan membantu BULOG meningkatkan fleksibilitasnya dalam penyerapan gabah petani lokal, melalui regulasi yang bisa lebih disesuaikan.

Pancing Kenaikan

Budhy juga mengingatkan bahwa kenaikan harga bahan pokok seperti beras akan memancing kenaikan harga bahan pangan lainnya, sehingga dapat terjadi inflasi. “Tentu ini nanti akan memancing kenaikan bahan-bahan pangan lainnya, memancing kenaikan harga-harga lainnya. Ini yang nanti akan memancing inflasi tentu ini juga harus hati-hati,” ungkapnya.

Menindaklanjuti keluhan-kesah masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Pasar Way Halim, Kota Bandar Lampung pada Kamis (7/3/2024) silam.



Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat melakukan peninjauan ke Pasar Way Halim, Kota Bandar Lampung pada Kamis (7/3/2024).

Benar saja, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat meninjau pasar di Bandar Lampung, Lampung mendapati harga pangan selain beras turut naik. “Banyak ibu-ibu mengeluh harga telur naik mencapai 31.000, ayam juga naik,” katanya.

Ia juga mendapatkan aduan adanya penjual beras SPHP nakal karena berjualan di atas harga eceran tertinggi. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pihaknya tak segan untuk bertindak tegas asal informasi tersebut valid. Selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan pencabutan izin jual beras SPHP sekaligus menghentikan pasokannya.

Namun demikian, Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi berpesan agar masyarakat tidak perlu panik atas kenaikan dan ketersediaan bahan pangan jelang Ramadan. “Masyarakat tidak perlu panik, karena (stoknya) tersedia. Jadi tidak hanya di operasi pasar, tapi di pasar-pasar tradisional. Itu memang sudah disiapkan tempat untuk menjual beras dengan harga pemerintah,” tutur Dwita. **aha/mh**



Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi saat meninjau ketersediaan pangan jelang Ramadan di Pasar Way Halim.

Merawat Relasi Strategis Indonesia-Rusia

Indonesia dan Rusia memiliki relasi kenegaraan yang cukup intens. Relasi kenegaraan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perekonomian, seperti ekspor-impor, melainkan juga relasi untuk saling bertukar gagasan dan pengalaman berdemokrasi, khususnya di momen pemilihan umum.



FOTO: IST/AR

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia.

Tercatat dalam sejarah, pada 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet, A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/ Menteri Luar Negeri Moh. Hatta. Rusia – yang saat itu masih Uni Soviet – mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun menyambut baik hal tersebut. Mei 1950 delegasi Indonesia yang dipimpin N. Palar dengan anggotanya

Yusuf Wibisono, Yamin, dan Hadinoto berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan. Hasil perundingan tersebut disampaikan pada Sidang Kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno, 16 Mei 1950, yaitu kesepakatan untuk saling membuka kedutaan besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.

Sejak tahun 2000 terjadi pertemuan yang sangat intensif antara Presiden Indonesia dan Presiden Rusia. Selama tahun 2000-2020 tercatat 13 kali pertemuan bilateral antara presiden kedua

negara, 4 kali di antaranya dilakukan saat kunjungan dan 9 kali lainnya di sela-sela konferensi internasional. Presiden Vladimir Putin telah bertemu dengan empat presiden Indonesia dari Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.

Merawat Relasi

Upaya merawat relasi kedua negara ini, tidak hanya di lingkup eksekutif, melainkan pula di legislatif. Hal itulah yang dilakukan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia, baru-baru ini. Selain Fadli Zon, hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana sebagai Pemantau Internasional proses demokrasi di Rusia itu.

Kehadiran delegasi BKSAP DPR RI tersebut untuk memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum Rusia dan Parlemen Rusia. Fadli Zon berkesempatan menyaksikan secara langsung proses pemilihan presiden Rusia di beberapa TPS, antara lain TPS nomor 453, 4563, dan 3532 di Moskow.

Pada kesempatan itu, Ketua BKSAP DPR RI juga mendapatkan penjelasan mengenai metode pemilihan yang terdiri dari tiga cara. Diantaranya manual dengan mencontreng pilihan pada kertas suara elektronik

dengan menggunakan gawai serta online yang bisa dilakukan di mana saja tanpa harus datang ke polling station.

Disamping itu bagi warga Rusia yang lanjut usia, petugas pemilihan akan berkeliling ke rumah-rumah dengan membawa kotak suara keliling. Kotak suara juga terbuat dari material plastik transparan namun tebal, yang dilengkapi sensor sehingga kertas suara dapat langsung dihitung dan pilihan warga bisa terlihat dengan cukup jelas.

"Ini menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi di Rusia. Bahwa berbeda pilihan itu biasa saja. Dengan dukungan teknologi tinggi tingkat kecurangan bisa ditekan dan ini berarti pemilunya semakin demokratis. Tak seperti yang dicitrakan selama ini," ujar Fadli Zon.

Sebagaimana diketahui, pada pemilihan Presiden Rusia kali ini terdapat 4 kandidat calon presiden. Vladimir Putin sebagai incumbent yang dicalonkan kembali oleh Partai Rusia Bersatu, Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru, Leonid Slutsky dari Partai Liberal, serta Nikolai Kharitonov dari Partai Komunis.

Tak hanya itu, legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut di sela-sela kegiatan sebagai observer juga melakukan courtesy call dengan Wakil Ketua Senat Rusia H.E. Ilyas Umakhanov. Ilyas Umakhanov adalah Wakil Ketua Senat sekaligus amirul haji Rusia.

Pada hari kedua, delegasi DPR melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Senat Rusia Konstantin Kosachev. Pertemuan membicarakan peran parlemen dalam meningkatkan hubungan bilateral dan persahabatan kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Jauh sebelum menjadi pemantau pemilu, DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji juga pernah menerima delegasi Rusia dan

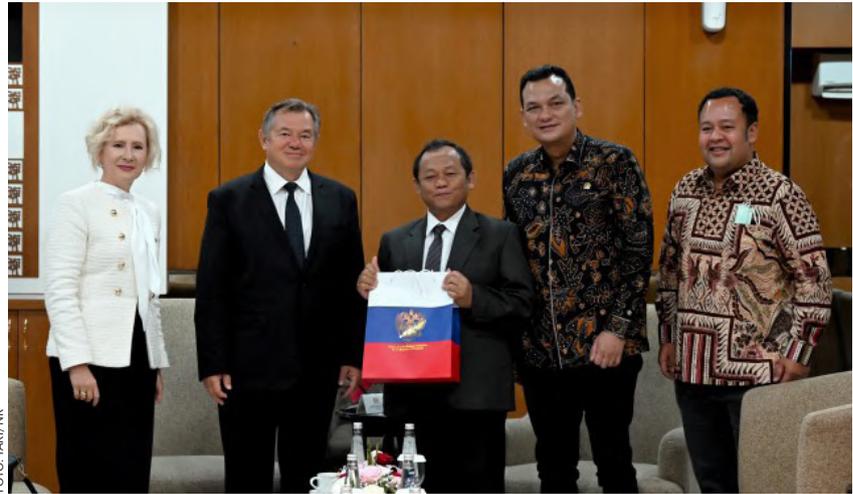


FOTO: TARI/NR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji didampingi Wakil Ketua Komisi VI Martin Y. Manurung dan Mohamad Hekal, foto bersama usai menerima delegasi Rusia dan perwakilan dari Eurasian Economic Commission (EEC).

perwakilan dari Eurasian Economic Commission (EEC) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Upaya merawat relasi strategis tersebut guna membahas potensi kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara persekutuan Eropa dan Asia (Eurasia) di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi.

"Apa yang ditawarkan sebenarnya sangat menarik karena beberapa potensi negara-negara Eurasia, termasuk Rusia di dalamnya, itu bisa dimanfaatkan untuk perekonomian kita. Misalkan kerja sama pupuk NPK atau tadi ada teknologi baru untuk mengeksplorasi natural hydrogen yang sangat memengaruhi ketersediaan energi kita dalam jangka panjang," ujar Sarmuji didampingi Wakil Ketua Komisi VI Martin Y. Manurung dan Mohamad Hekal, Januari silam.

Selain membahas potensi kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi, kedua belah pihak juga membicarakan potensi eksplorasi natural hydrogen. Indonesia memiliki potensi terhadap sumber daya alam tersebut.

"Tadi disampaikan, dilihat dari sisi geografi dan geologi kita, kemungkinan kita bisa mengeksplorasi natural hydrogen

itu sangat besar. Nah, itu kalo bisa BUMN kita bersinergi dengan BUMN-BUMN negara-negara tersebut atau dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan negara-negara tersebut untuk mengeksplorasi natural hydrogen. Itu akan menjadi kekuatan tambahan bagi ketersediaan energi kita ke depan," jelas Sarmuji.

Sarmuji menilai apabila BUMN bisa bersinergi dengan BUMN atau perusahaan di negara-negara tersebut untuk mengeksplorasi natural hydrogen, maka akan menjadi kekuatan tambahan bagi ketersediaan energi Indonesia ke depan. Pihaknya meyakini bahwa kerja sama ini akan bersifat timbal balik dan Indonesia akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan ekspor ke negara-negara persekutuan Eurasia.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan akan menyampaikan hasil pertemuan kepada Kementerian BUMN yang merupakan mitra kerja Komisi VI. "Misalkan kerja sama perdagangan atau nanti barangkali ada BUMN yang tertarik kerja sama di bidang eksplorasi natural hidrogen kami juga akan sampaikan karena ini teknologi baru, teknologi yang menarik, dan kita memiliki potensi yang cukup besar," imbuhnya.

syn,blf/mh



**DAERAH PEMILIHAN
(DAPIL)**



M. Nurdin

Serahkan Bantuan Bibit Buah

Anggota DPR RI M. Nurdin menyerahkan 1.500 bibit buah kepada Yayasan Nurul Falah Langkap Lancar di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Bantuan bibit sangat bermanfaat bagi warga setempat terutama para petani.

Anggota Komisi IV DPR RI ini, sangat peduli pada masyarakat konstituennya. Pada acara penyerahan bibit itu hadir 500 tokoh masyarakat dan para pengurus daerah PDI Perjuangan. Nurdin yang kebetulan duduk di komisi pertanian mengarahkan bantuannya pada dunia pertanian.

Legislator dapil Jabar X (Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran) aktif

bersilaturahmi dengan masyarakat di dapilnya. "Alhamdulillah, Pak Nurdin bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI dapat menyalurkan aspirasi bibit buah untuk pemberdayaan masyarakat, semoga bermanfaat," kata Sutrisno, tenaga ahli M Nurdin dalam keterangan tertulisnya.

Sementara di Kota Banjar, Nurdin melakukan silaturahmi dengan kader Pos Layanan Terpadu (Posyandu) dan struktur

partai. Dalam kunjungannya, ia menyalurkan bantuan biskuit untuk ibu hamil dalam mendukung program pencegahan stunting. Tak hanya di Banjar dan Pangandaran, Nurdin juga menyalurkan bantuan di Kabupaten Kuningan.

Di Kuningan, Nurdin mengunjungi pesantren dan menyerahkan sertifikat bagi warga setempat lewat program PTSLPM, hasil kerja sama dengan rekan anggota Komisi II DPR. "Salah satu aspirasi masyarakat adalah program PTSL. Alhamdulillah, atas kerja sama dengan rekan anggota DPR RI Komisi II, kita dapat merealisasikan harapan masyarakat, semoga menjadi manfaat untuk masyarakat," tukas Nurdin. (pun/mh)

gal/mh



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI M. Nurdin saat menyerahkan 1.500 bibit buah di Kabupaten Pangandaran.

Darul Siska

Temui Balita Penderita Hydrocephalus



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Darul Siska saat berkunjung ke rumah seorang balita yang menderita penyakit hydrocephalus di Nagari Koto Laweh.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat I Darul Siska menemui seorang balita yang menderita penyakit hydrocephalus di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembah Jaya, Kabupaten Solok.

■ a langsung bergerak menghampiri kediaman orangtua balita penderita hydrocephalus tersebut. Balita malang ini diketahui bernama Alfarizi Shahputra berumur 6 bulan. Hasil diagnosa dokter, sang bayi menderita hydrocephalus semenjak berada dalam kandungan.

Alfarizi merupakan anak kedua pasangan Syafrianto dan

Siska. Saat rombongan datang, Alfarizi terbaring dengan selang di kepalanya, dengan kondisi yang sangat memperhatikan. Tampak ukuran kepala balita ini sangat tidak normal, sekitar dua kali ukuran kepala orang dewasa.

"Kita prihatin atas penderitaan yang dialami Alfarizi dan kedua orangtuanya hari ini. Kita harus lebih intensif penanganannya oleh

dokter, karena nanti saya akan minta Direktur M. Djamil agar memberikan perhatian khusus kepada Alfarizi, kalau perlu dokternya datang rutin untuk memantau perkembangannya," ucap Anggota Komisi IX itu kepada orangtuanya.

Darul Siska menyarankan kepada orangtuanya agar memberikan perhatian yang lebih kepada Alfarizi agar selalu berkoordinasi dengan puskesmas terkait perkembangan Alfarizi. Tak lupa ia mengajak berdoa kepada Allah SWT, karena anak tersebut adalah titipan dan orangtua harus menjaga dan merawatnya.

 rdn/mh

Siti Nurizka

Buka Turnamen Sepak Bola

Anggota DPR RI Siti Nurizka membuka kick off pertandingan sepak bola bertajuk 'Siti Nurizka Cup se-Kota Palembang' di Sumatera Selatan. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi dan bibit sepak bola di Kota Palembang.



FOTO: IST/NIR

Anggota DPR RI Siti Nurizka saat membuka kick off pertandingan sepak bola bertajuk 'Siti Nurizka Cup se-Kota Palembang' di Sumatera Selatan.

ia mengungkapkan bahwa dukungannya adalah bentuk komitmen untuk mengupayakan kelahiran bibit-bibit baru pesepak bola Indonesia agar dapat bersaing di kancah dunia.

"Tugas saya adalah mendorong anak-anak muda ini untuk menjadi atlet di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa melalui turnamen seperti ini, kami dapat menemukan dan membina bibit-bibit sepak bola

yang berbakat," ungkap Nurizka dalam keterangannya yang diterima tim Parlementaria, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan turnamen ini bukan hanya kegiatan olahraga semata. Namun, wujud kepedulian pihaknya terhadap perkembangan olahraga di wilayah Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang memiliki banyak

“

Tugas saya adalah mendorong anak-anak muda ini untuk menjadi atlet di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa melalui turnamen seperti ini, kami dapat menemukan dan membina bibit-bibit sepak bola yang berbakat

pemuda dan pemuda yang sangat berpotensi menjadi atlet sepak bola berkelas. Bahkan, beberapa di antaranya baru-baru ini berhasil ditarik masuk ke Timnas U-17 dan Liga Ternama. Potensi ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat lahir lebih banyak atlet muda berbakat yang akan menjadi kebanggaan Sumatera Selatan di tingkat nasional bahkan internasional. Dan seluruh tokoh juga terus mendukung lahirnya atlet-atlet bola di masa yang akan datang," pungkasnya.

hal/mh

Sri Wulan

Santuni Relawan Disabilitas



FOTO: IST/INR

Anggota DPR RI Sri Wulan saat menyambangi masyarakat Blora dan Grobogan dalam rangka menyerap aspirasi serta serah terima Program Kemaslahatan BPKH.

Anggota DPR RI Sri Wulan menggelar temu relawan bersama masyarakat di Rembang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu Wulan menyantuni para relawan disabilitas yang selama ini selalu ikut mendukungnya menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah III (Pati, Grobogan, Rembang, dan Blora).

Selain di Rembang, Wulan juga menyambangi masyarakat Blora dan Grobogan, Jawa Tengah. Selain menyerap aspirasi masyarakat terkait kesejahteraan masyarakat, dalam kesempatan itu juga digelar serah terima Program Kemaslahatan BPKH (badan pengelola keuangan haji), berupa ternak kambing breeding di Blora dan Grobogan.

Sebagaimana diketahui, program kemaslahatan merupakan program pemerintah pusat, khususnya BPKH

sebagai bentuk komitmen ikut mengambil peran dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Dana program kemaslahatan itu berasal dari nilai manfaat pengembangan dana abadi umat (DAU)

Seolah tidak pernah lelah menyambangi konstituennya, Wulan juga menggelar pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Acara P2K2 sendiri sejatinya merupakan program dari Kementerian Sosial sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

P2K2 ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial agar mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

Tidak lupa di masa reses nya ini, politisi Partai Nasdem itu, menggelar Jamarah alias jagong masalah umrah dan haji. Program nasional yang digelar bersama dengan Kementerian Agama ini menjadi sarana berdiskusi mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada. Tujuannya tak lain mengajak pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk bersama-sama meningkatkan sistem pelayanan ibadah haji dan umrah tahun 1445 H/2024 M dan tahun-tahun berikutnya.  ayu/mh

Ruslan M Daud

Membangun Akses dan Keadilan di Desa Paya Palas

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud telah melangkah ke Desa Paya Palas, Kecamatan Rantau Pereulak, Aceh Timur, Januari lalu untuk meninjau rencana pembangunan jalan yang akan menggunakan Anggaran APBN. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk meratakan infrastruktur daerah, khususnya di desa-desa terpencil.



FOTO: IST/NR

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud saat meninjau rencana pembangunan jalan di Desa Paya Palas, Aceh Timur.

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud telah melangkah ke Desa Paya Palas, Kecamatan Rantau Pereulak, Aceh Timur, Januari lalu untuk meninjau rencana pembangunan jalan yang

akan menggunakan Anggaran APBN. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk meratakan infrastruktur daerah, khususnya di desa-desa terpencil.

Selain menyoroti proyek jalan, HRD juga memperhatikan kondisi

jembatan rusak yang menjadi jalur vital bagi petani dan akses pendidikan bagi anak-anak. "Dengan merujuk pada Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, HRD menjelaskan bahwa penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur daerah sekarang memungkinkan, dengan syarat proyek tersebut produktif," jelas legislator Dapil Aceh II.

Dalam upaya menciptakan keadilan, Anggota Fraksi PKB ini menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Proyek ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas administrasi yang dibutuhkan.

Proyek ini tidak sebatas pada aspek fisik, namun juga sebagai wujud dari Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. HRD menekankan, program ini tidak terbatas, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah, sebagai langkah menuju pemerataan pembangunan infrastruktur yang inklusif.

Dengan komitmen HRD dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan di Desa Paya Palas menjadi representasi nyata dari upaya mencapai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 rnm/mh

Sartono Hutomo

Apresiasi PLN Sambung Listrik Gratis Bagi Kaum Duafa

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo memberikan apresiasi pada Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN yang telah merealisasikan program sambung listrik gratis bagi 1.854 warga tidak mampu di 15 kecamatan, Kabupaten Ponorogo melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).



FOTO: IST/NR

FOTO: IST/NR

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo ikut menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Ponorogo.

“Melalui Program BPBL ini semoga senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap, semoga program ini bisa berlanjut lagi, sehingga berdampak mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sartono di Ponorogo, Jawa Timur, Februari lalu.

Legislator Dapil Jawa Timur VII ini menjelaskan, Program BPBL

“program ini dilaksanakan karena ada warga yang tidak mampu untuk bayar biaya pasang baru listrik

yang diinisiasi Kementerian ESDM ini bertujuan mewujudkan listrik berkeadilan untuk masyarakat tidak mampu, khususnya yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain dihadiri oleh Sartono Hutomo, acara ini dihadiri oleh Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Ditjen Ketenagalistrikan Hari Purnomo, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diwakili Wahyudi Kepala Dinas Perhubungan, Staf Ahli Direktur Retail PT PLN (Persero) Priyo Wuriyanto, dan Manager PLN UP3 Ponorogo Suzana Zein.

Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan, Hari Purnomo dalam sambutannya mengatakan program ini dilaksanakan karena ada warga yang tidak mampu untuk bayar biaya pasang baru listrik, sehingga mereka menyalur sambungan listrik dengan tetangga.

“Ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik, sehingga akan semakin banyak warga yang kurang mampu, namun tetap bisa menikmati jaringan listrik,” terangnya. 

Nevi Zuairina

Bagikan Paket Ramadan

Menyambut bulan suci Ramadan, semangat kepedulian sosial tak pernah padam, terutama bagi Nevi Zuairina, Anggota DPR RI dari dapil Sumatera Barat II.

Pada pekan pertama Ramadan ini ia berkunjung ke Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman. Pembagian paket Ramadan ini merupakan bagian dari serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk membantu meringankan beban warga dalam menjalankan ibadah puasa.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga di wilayah Sumatera Barat II dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, tanpa kekhawatiran akan kebutuhan pokok," ujarnya. Respon positif pun mengalir dari masyarakat yang menerima bantuan ini. Di tengah kondisi ekonomi yang masih dipulihkan pasca-pandemi Covid-19, bantuan paket Ramadan menjadi sangat berarti bagi banyak warga.

Ibu Ani (45), adalah salah satu yang mendapat bantuan. Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan tersebut. Namun, pembagian paket Ramadan ini tidak sekadar bantuan materi. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat tali persaudaraan dan gotong royong di masyarakat. Nevi berharap, kegiatan ini menjadi



FOTO: ISTANR

Anggota DPR RI Nevi Zuairina, saat membagikan bantuan paket Ramadan di Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman.

“

Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga di wilayah Sumatera Barat II dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan

contoh bagi banyak pihak untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama.

Dalam proses pembagian paket Ramadan, Nevi didampingi tim dan relawan yang turut serta mendistribusikan bantuan langsung kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menstimulasi ekonomi lokal dengan mengedepankan produk-produk dari produsen dan UMKM setempat.

Sebagai seorang Anggota Komisi VI DPR RI Nevi memiliki fokus pada pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui kegiatan pembagian paket Ramadan dan berbagai program lainnya, Nevi berharap dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk saling membantu dan bersinergi menghadapi berbagai tantangan. 

Athari Gauthi Ardi

Resmikan Gedung Rusunawa Thawalib Padang Panjang



Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi saat meresmikan Gedung Rusunawa Thawalib Padang Panjang. Foto: Ist/nr

Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi meresmikan Gedung Rusunawa Thawalib Padang Panjang dalam sebuah acara yang dihadiri para tokoh penting, seperti Pj Wali Kota dan Ketua DPRD, pada tanggal 5 Februari 2024 lalu.

Gedung dengan kapasitas 120 orang yang terletak di kompleks Thawalib Putra itu merupakan hasil program Athari dengan dana pembangunan lebih dari Rp7 miliar dari Kementerian PUPR.

"Pembangunan Padang Panjang tidak cukup hanya dengan APBD saja, butuh kerja sama dengan

pemerintah pusat, contohnya adalah pembangunan Gedung Rusunawa Thawalib yang menghabiskan dana lebih dari 7 miliar ini," katanya.

Athari berjanji terus membantu pembangunan di daerah pemilihannya Sumatera Barat. Jika ada usulan-usulan baru, ia juga mengajak alumni dan pengusaha lokal bersatu dalam membangun

dan merenovasi bangunan sekolah lainnya, bukan hanya di Thawalib

Pj Wali Kota mengapresiasi dukungan Athari dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, sambil berharap agar Kota Padang Panjang terus dimasukkan dalam program pembangunan di masa mendatang.

rnm/mh

Emu Umiyyatul Chisnah

Gelar Bimbingan Teknis untuk Nelayan



Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ema Umiyyatul Chusnah secara khusus mengajak ibu-ibu dan keluarga nelayan di Kabupaten Jombang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan.

Dalam Bimtek tersebut, Ema berharap keluarga nelayan dapat meningkatkan motivasi, inovasi, keterampilan, dan kompetensinya

dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

"Sisi terpenting Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip pengembangan

usaha. Yaitu dengan memperhatikan peluang usaha, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk dalam menciptakan mata pencaharian alternatif bagi keluarga nelayan." Kata Ning Ema, sapaan Ema.

Dengan menggandeng Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Ning Ema berharap peserta Bimtek dapat membawa kebermanfaatannya serta ketepatan sasaran, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan perekonomian bagi keluarga nelayan maupun pembudidaya perikanan.

"Ibu-ibu di sini harus menjadi wanita tangguh, mandiri, dan mampu memberikan motivasi, bekerja sama dan terus berkarya dalam meningkatkan taraf hidup melalui produk unggulan yang telah diciptakan," pungkash Ning Ema.

Dalam Bimtek tersebut, selain mendapatkan materi, ibu-ibu nelayan juga mendapatkan kesempatan praktik membuat makanan dari olahan ikan, yaitu rempeyek lele, kulit patin krispi, dan nugget ikan patin.

bia/mh





Suhartono, sebagai pendiri Yayasan Jamrud Biru

Suhartono

Jadi Suaka 'Jamrud Biru' Bagi ODGJ

15 tahun, Suhartono berusaha merawat luka batin orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Yayasan Jamrud Biru. Walaupun terbentur oleh serba keterbatasan, dirinya berusaha berdaya untuk mempertahankan suaka bagi ODGJ.

Kisah ini berawal sejak Suhartono menjadi perawat di Panti Rehabilitasi ODGJ di Yayasan Galuh Bekasi pada tahun 2001. Beberapa tahun merawat mereka, hatinya terketuk untuk membangun sebuah harapan, membangun suaka bagi ODGJ. Perlahan namun pasti, ia bisa membangun Yayasan Jamrud Biru yang terletak di Kelurahan

Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi pada 2009.

Arti nama Jamrud Biru, bagi Suhartono, adalah permata yang luas. Ia ingin setiap pasien yang telah berhasil diobati di Yayasan Jamrud Biru dapat kembali ke masyarakat dan bisa berguna bagi masyarakat.

Bergelut dengan rasa iba yang turut didorong oleh rasa kemanusiaan, ayah dari tiga anak ini tekun mengurus, merawat, dan mengobati

ODGJ. Bahkan, tidak jarang dirinya membawa ODGJ yang terlantar di jalan untuk dirawat di Yayasan Jamrud Biru.

Sepanjang pengalaman yang ia alami, ODGJ seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Padahal, imbuhnya, mereka sejatinya adalah tetap manusia yang masih memiliki kesempatan untuk sembuh dan hidup normal kembali.

"Setiap orang punya gangguan jiwa, cuma kadar atau tingkat keparahannya aja yang berbeda-beda. Stres akibat tekanan kerja, lalu ngomel-ngomel, itu salah satu gangguan jiwa. Saya enggak tega (melihat ODGJ). Saya memilih mendirikan yayasan sendiri dengan



FOTO: IST/NR

Para pasien ODGJ yang dirawat di Yayasan Jamrud Biru.

niat untuk ibadah membantu saudara-saudara kita yang begini supaya bisa sembuh," tutur Suhartono kepada Parleментарia.

Di Yayasan Jamrud Biru, terapi penyembuhan untuk orang gangguan jiwa dilakukan dengan cara tradisional seperti terapi pijat saraf, totok, pemberian ramuan jamu, vitamin, hingga terapi siraman rohani dengan kegiatan ibadah. "Kalau ramuan jamu saya pelajari dari turun temurun. Urut juga saya pelajari dari kakek saya," ungkapnya

Puluhan tahun berada di Yayasan Jamrud Biru ini, pahit dan getir telah ia rasakan selama merawat ODGJ. Satu waktu, Suhartono pernah terluka hingga jari kelingkingnya putus akibat dibacok oleh ODGJ yang mengamuk.

"Waktu itu ketika saya mau mengamankan dia (pasien gangguan jiwa), kondisi lagi ngamuk bawa golok, pas mau diamankan, saya diserang kena jari kelingking putus," tuturnya.

Kini, ada sekitar 25 orang pegawai di Yayasan Jamrud Biru yang membantunya untuk mengurus ODGJ. Sebagian besar dari mereka bukan tenaga medis, melainkan pegawai biasa yang diajari oleh Suhartono untuk merawat pasien secara otodidak.



"Saya ajarin mereka bagaimana merawat orang gangguan jiwa dengan kasih sayang, tidak ada kekerasan, kalau buang air bagaimana cara membantu bersihkan, mau makan kalau pasien tidak bisa makan sendiri kita suapi," jelas Suhartono.

ODGJ Juga Manusia

Kesehatan mental menjadi salah satu isu yang marak, kini telah disadari dan dibicarakan dewasa ini. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan pemeliharaan kesehatan jasmani. Perlu diketahui, ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pelan-pelan, Yayasan Jamrud Biru ingin membantu mengubah perspektif masyarakat. Saat ini, ada 156 pasien yang dirawat oleh Yayasan Jamrud Biru. Masing-masing



dari mereka berasal dari sejumlah daerah, yang tentu tidak hanya berasal dari Bekasi.

"Beberapa ada pasien yang sembuh, macam-macam (jangka waktu mereka bisa dinyatakan sembuh). Ada yang satu bulan, dia sudah sembuh. Ada yang setahun, ada yang bertahun-tahun, bahkan (ada) pasien abadi juga ada di sini," terangnya.

Pasien di Jamrud Biru rata-rata memiliki gangguan skizofrenia hingga halusinasi. Ada yang depresi maupun stres ringan. Penyebab gangguan pasien di Jamrud Biru sangat bervariasi, mulai dari efek perusakan (bullying), keluarga yang disfungsi, ekonomi, pengaruh obat-obatan, sampai yang paling ekstrim seperti ilmu hitam alias santet.

Ia pun bercerita bahwa para pengurus Jamrud Biru jatuh bangun mempertahankan kiprah yayasan. Stigma, minimnya dukungan, serta kesulitan finansial datang silih berganti. Namun, mereka percaya bahwa segala keterbatasan dan rintangan, tak akan membikin mereka mengibarkan bendera putih.

Selama ODGJ dirawat di Yayasan Jamrud Biru, Suhartono menetap jadwal pembinaan untuk para ODGJ. Pada pagi hari diisi dengan senam pagi, menyanyikan lagu wajib, membaca ayat suci Al Quran, lalu masuk ke sore hari membaca iqro, terapi daya ingat, hingga berdoa bersama.  rdn/mh

Kinerja DPR RI dan Persepsi Publik

Senyum di wajah Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso merekah seperti bunga yang sedang mekar di pagi hari saat ia menerima kabar gembira bahwa Setjen DPR RI meraih penghargaan prestisius di Public Relation Indonesia Awards 2024. Kunjungan Edukasi Parlemen yang dihelat berhasil meraih perunggu, menandai pencapaian gemilang dalam upaya memasyarakatkan pemahaman tentang fungsi parlemen.

S Kegiatan ini memang menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak usia TK hingga mahasiswa di seluruh Indonesia. Mereka rela mengantri menjejalkan kaki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Bahkan, data tahun 2023 mencatat bahwa sebanyak 25.590 orang dari 216 sekolah atau instansi telah datang berkunjung, menandakan antusiasme yang luar biasa.

Agung tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Setjen DPR yang terus menerima penghargaan. Ini bukan kali pertama, dua minggu sebelumnya Setjen DPR juga meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Penbendaharaan Negara, yang secara rutin memberikan KPPN Award kepada kementerian/ lembaga negara yang berprestasi. Hal ini semakin menegaskan reputasi gemilang Setjen DPR dalam bidangnya. Tahun ini, Setjen DPR meraih dua penghargaan prestisius.

Mereka berhasil meraih peringkat tiga dalam kategori nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dengan anggaran yang mencapai

lebih dari Rp750 miliar, serta peringkat tiga dalam kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Prestasi ini menandai komitmen Setjen DPR dalam mengelola anggaran dengan efisien dan menerapkan inovasi dalam penggunaan teknologi keuangan pemerintah.

"Saya mengapresiasi Sekjen DPR dan tentu beserta jajarannya atas kinerjanya selama ini. Sehingga, mampu meraih penghargaan KPPN Award 2023 ini. Tentu prestasi ini bukan hal yang mudah, mengingat selain DPR RI banyak kementerian dan lembaga lain yang juga berusaha untuk melaksanakan penggunaan anggaran dengan baik. Namun, pada akhirnya DPR dinilai menjadi salah satu yang terbaik dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan negara," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar I ini.

Parlemen Remaja juga menjadi program yang diminati, di mana pelajar tingkat SMA dari berbagai daerah berpartisipasi dalam simulasi menjadi anggota DPR RI. Mereka terlibat dalam sidang, menyampaikan pendapat, dan menggelar rapat paripurna, membantu memahami



Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso.

pentingnya demokrasi di Indonesia melalui pengalaman langsung dengan narasumber yang kompeten

Magang di Rumah Rakyat, kerja sama antara Sekjen DPR dan Kemendikbudristek, telah menjadi sorotan publik. Lebih dari 26 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia mendaftar tahun ini, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 23 ribu. Namun, dengan keterbatasan tempat, hanya 350 orang yang diterima.

Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Suratna, menyampaikan tahun 2023 lalu, jumlah pendaftar mencapai 9.996 remaja, yang berasal dari 4.370 sekolah, dari 427 kabupaten/kota dan 80 daerah pemilihan (Dapil) di Indonesia. "Setelah mengikuti proses seleksi yang ketat, terpilih 134 siswa-siswi tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan sederajat yang berhasil lolos menjadi yang terhormat Anggota Parlemen Remaja 2023," ungkap Suratna.

Kenapa Kepercayaan Publik Rendah?

Meskipun DPR RI berhasil mengumpulkan sejumlah penghargaan sepanjang tahun 2023 (lihat kotak ragam penghargaan), namun fakta menarik muncul dari hasil survei tingkat kepercayaan publik yang menunjukkan angka yang masih rendah. Survei Indikator Politik Indonesia Tahun 2023 mencatat bahwa hanya 7,1 persen masyarakat yang sangat percaya pada DPR RI, sementara 26,6

persen kurang percaya, dan 61,4 persen hanya cukup percaya. Hal ini mengundang pertanyaan menarik mengenai persepsi dan harapan publik terhadap lembaga legislatif tersebut.

Tingkat kepercayaan publik pada DPR RI terus menimbulkan tanda tanya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaikOPI, Kunto Adi Wibowo pun mengungkapkan empat alasan yang menarik. Pertama, rendahnya pengetahuan publik tentang tugas dan fungsi DPR, yang membuat sulit bagi mereka untuk memercayainya.

Kedua, sejarah buruk tentang legislatif di Indonesia telah menciptakan stigma yang sulit dihapuskan. Ketiga, kesulitan dalam membedakan antara DPR dan DPRD. Citra buruk DPRD ikut merusak reputasi DPR. Terakhir, kompleksitas struktur dan dinamika kerja DPR yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Solusinya? Menurut Kunto, edukasi politik yang masif akan menjadi kunci mengubah pandangan masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap DPR. 

Penghargaan 2023-2024

1. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Layanan Setjen DPR RI yang melebihi target dengan nilai kepuasan 3,31.
2. DPR RI memperoleh opini WTP dari BPK RI 13 kali berturut-turut.
3. Mewujudkan budaya bersih dari korupsi melalui pemastian ketaatan pelaporan yang telah mencapai 100 persen Wajib Laporan LHKPN dan LHKASN.
4. Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada 4 (empat) unit kerja, yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Persidangan II, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Kajian Anggaran.
5. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah melewati target dengan tingkat pencapaian "Baik".
6. Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik II Tingkat Lembaga Negara dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
7. Anugerah Meritokrasi dengan kriteria Sangat Memuaskan dengan nilai 344.45.
8. Penghargaan sebagai Best Starter Survei Indeks BerAKHLAK (kolaboratif) dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. PPID DPR RI meraih penghargaan "Silver Winner" untuk kategori Website PPID Terinovatif oleh Anugrah Humas Indonesia (AHI).
10. Penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam peningkatan kualitas Pendidikan dari Universitas Indonesia.
11. Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Keamanan Siber dari BSSN.
12. Juara Ketiga kategori "Utilitas Barang Milik Negara" dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. • Peringkat kedua Evaluasi penerapan Sistem Manajemen Kinerja dari BKN.
13. Penghargaan Digital Transformation di Indonesia. Award 2022 kategori Excellent Public Service Digitization Initiatives and Superintendent dari MNC Group
14. Penghargaan "Sonora Excellent Government Appreciation Award".
15. Anugerah IPRAHUMAS 2022 kategori Pranata Humas, sub Kategori Pranata Humas Pertama.
16. Penghargaan Bronze Winner dalam Jang public Relations Indonesia Award 2022 untuk Pameran daring "Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia".
17. Anugerah penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Publik.
18. Setjen DPR RI mendapatkan nilai A dengan kategori sangat baik atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 dari KemenPANRB terhadap dukungan layanan persidangan.
19. Penghargaan atas Kontribusi Pemenuhan Kewajiban Pajak.
20. Memperoleh sertifikat Indeks Keamanan Informasi dan sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Keamanan Siber dari BSSN.
21. Perpustakaan DPR RI meraih Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
22. Penghargaan Juara III Kegiatan Kesiapsiagaan Teknis Penanganan Insiden Keamanan Siber Sektor Pemerintahan Pusat dari BSSN.
23. Penghargaan Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
24. Peringkat 3 penghargaan BKN Award 2022 dengan Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian pada Non Kementerian Tipe Besar.
25. Juara Ketiga kategori "Utilitas Barang Milik Negara" dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
26. Peringkat kedua Evaluasi penerapan Sistem Manajemen Kinerja dari BKN.
27. Penghargaan atas Realisasi SV Terbesar Periode Januari-September 2022 dari Staker Kelolaan KPPN Jakarta VII.
28. Penghargaan atas peran sertanya dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bsgi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
29. Peringkat ke-4 dengan nilai 94,71 (Sangat Baik) untuk Kinerja Anggaran tahun 2022 Kategori Kementerian Negara/ Lembaga dengan Pagu Sedang.
30. Peringkat ke-3 untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Setjen Mitra KPPN VII.
31. Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sekretariat Jenderal (UPZ BAZnas Setjen DPR RI) memperoleh penghargaan apresiasi dari Baznas untuk kategori "The Rising Star".
32. Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI meraih penghargaan sebagai Juara III penerima IDIA (Indonesia Digital Initiative Award) 2023 kategori Pengguna Website Terbaik dan Juara III Pengguna Media Sosial Terbaik tingkat Lembaga Negara di Indonesia.
33. Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI meraih penghargaan Media Cetak dan online Terpopuler 2022 di ajang Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023.
34. Sekjen DPR RI Indra Iskandar meraih penghargaan dari media Warta Ekonomi sebagai Top Leader dalam kategori Top Public Relation Leader 2023 for Developing Macroeconomics in Indonesia to Pursue Equal Welfare dengan kategori Government.
35. Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI meraih penghargaan Pelaksanaan Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam 2023 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) untuk Buletin "Parlementaria".
36. KPPN Award 2024 - Peringkat Ketiga Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Peringkat Ketiga Kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
37. Public Relation Indonesia Awards 2024, Kunjungan Edukasi Parlemen memperoleh Bronze Winner.





Oleh:
dr. Indah Febrina P
PUSKESMAS Baturiti 1
Tabanan

Dari pergantian musim kemarau ke musim hujan ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan, salah satunya penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Umumnya penyakit ISPA adalah penyakit menular yang disebabkan virus dan bakteri yang berada di sekitar masyarakat. Namun, penyakit ini akan sulit tertular jika masyarakat mematuhi pentingnya protokol kesehatan dan menjaga imunitas tetap dalam kondisi yang baik.

Virus dan bakteri ini menular jika terdapat kontak dengan orang yang terinfeksi ISPA. Transmisi penyakit ISPA dapat ditularkan melalui air liur, udara ketika bersin, sentuhan dengan benda yang terkontaminasi virus atau bakteri penyebab ISPA dan perilaku hidup sehat yang kurang baik. Beberapa contoh penyakit ISPA yang lebih dikenal di masyarakat adalah flu biasa, influenza, sinus, radang tenggorokan dan yang sangat terkenal belakangan ini adalah Covid-19.

Kenali Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Musim Hujan

Pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan menyebabkan sistem imun pada seseorang bekerja lebih ekstra, yang mengakibatkan imun seseorang mengalami penurunan. Pada musim penghujan lingkungan menjadi lembab yang memudahkan kuman bakteri, virus, dan jamur semakin berkembang karena udara yang lembab dan kotor.



Faktor Risiko Penularan ISPA

ISPA adalah kondisi yang bisa terjadi pada siapa saja, terlebih lagi kondisi ini termasuk dalam penyakit yang mudah menular. Namun, beberapa orang dengan beberapa kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko terjadinya ISPA, di antaranya yaitu:

1. Orang yang memiliki sistem imunnya rentan, terutama anak-anak dan lansia..
2. Memiliki penyakit sistem pernapasan sebelumnya seperti, paru obstruktif kronik, asma, dan gagal jantung.
3. Menderita penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi sistem imun seperti pengidap HIV/AIDS, leukemia atau pasca transplantasi organ.
4. Anak yang dari lahir memiliki riwayat penyakit jantung bawaan atau paru-paru.

Kenali Gejala ISPA

Gejala ISPA dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Saat terinfeksi gejala dapat berlangsung sekitar 1–2 minggu. Diperlukan pengenalan terhadap gejala tersebut agar masyarakat dapat menghindari dan mencegah penularan dari penyakit ISPA. Berikut beberapa gejala-gejala ISPA yang perlu diketahui:

Gejala Umum

1. Batuk
Batuk adalah gejala utama ISPA. Ini bisa menjadi batuk kering atau batuk berdahak.
2. Hidung Tersumbat
Hidung tersumbat adalah ketika saluran hidung Anda menjadi penuh dengan lendir atau pembengkakan, membuat penderita sulit bernapas melalui hidung.
3. Sakit Tenggorokan
Rasa sakit atau seperti terbakar di tenggorokan adalah gejala umum ISPA. Ini seringkali membuat menelan makanan atau minuman menjadi sulit.

4. Demam
Demam adalah respon alami tubuh terhadap infeksi.
5. Pilek
Pilek atau hidung berair adalah gejala umum ISPA, terutama jika infeksi menyerang sinus.

Gejala Tambahan

Selain gejala umum dari ISPA, sering juga di jumpai gejala-gejala tambahan seperti:

1. Sakit kepala.
2. Nyeri Otot dan sendi
3. Lemas atau lelah
4. Suara serak atau hilangnya suara
5. Nafsu makan menurun.
6. Sesak napas atau sulit bernapas

Perlu diketahui bahwa keadaan sesak napas atau kesulitan bernapas merupakan gejala serius yang harus segera diatasi. Ini bisa menjadi tanda bahwa infeksi telah mencapai paru-paru dan keadaan ini harus segera dikonsultasikan dengan dokter.

Atasi ISPA Gula Ringan di Rumah

Beberapa penanganan yang biasa dilakukan pada pasien pengidap ISPA ringan di rumah adalah:

1. Istirahat dengan cukup dan memperbanyak minum air putih.
2. Minum lemon hangat atau madu untuk meredakan batuk.
3. Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk melancarkan pernapasan.
4. Mengonsumsi obat pereda demam dan nyeri pada tubuh jika perlu.
5. Mengonsumsi obat batuk yang tersedia di apotek terdekat.
6. Mengonsumsi obat untuk peradangan atau pembengkakan saluran pernapasan.

Cara-cara di atas cukup untuk menangani ISPA ringan. Namun, apabila gejala yang dirasakan tidak kunjung membaik bahkan setelah ditangani dengan obat-obatan, sebaiknya Anda mengunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan. 🦋

Pencegahan penyakit ISPA

Keberadaan virus atau bakteri memang tidak bisa kita tebak. Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat Anda terapkan agar terhindar dari ISPA, berikut di antaranya:

1. Seringlah mencuci tangan dengan bersih, terlebih setelah beraktivitas di luar rumah.
2. Menghindari kebiasaan merokok.
3. Meminimalisir sentuhan tangan pada wajah, terutama bagian mulut dan hidung.
4. Menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara yang benar.
5. Segera mandi, keringkan dan hangatkan badan jika basah terkena air hujan.
6. Mengonsumsi protein, buah, sayur, dan vitamin untuk menambah imunitas tubuh.
7. Istirahat yang cukup dan berolahraga secara teratur

Penyengat:

Bertemu Pujangga yang Enggan Hilang di Bumi

“Belum afdhol ke Tanjung Pinang kalau belum ke Pulau Penyengat,” sebut teman saya saat berkunjung di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini. Pulau kecil yang berada di seberang Pulau Bintan, tempat Tanjung Pinang berada, memang jadi tempat penting bagi budaya melayu. Dimana dua negara, Indonesia dan Malaysia, disebut saudara serumpun karena ikatan melayu itu.

Mi Lendir

Mengawali pagi di kota ini saya memilih sarapan Mi Lendir di sebuah kedai kopi di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Sebutan mi ini mungkin bagi sebagian orang tidak appetite, namun saya jamin anda yang mencobanya pertama kali pasti akan jatuh cinta.

Olahan mie ini mirip Mi Celor asal Palembang, menggunakan kaldu ikan dan bumbu udang ebi. Namun yang khasnya, intepretasi masyarakat Kepri terhadap kuahnya, dicampur tumbukan kacang tanah dan gula merah. Paduan itu menghasilkan kuah yang kental dengan cita rasa gurih



dan manis, kalau mau pedas tinggal tambah cabe rawit di dalamnya.

Ke Seberang

Selesai sarapan, saya bergegas jalan ke ke arah dermaga penyeberangan ke Pulau Penyengat.

FOTO: AGUNG/NR





FOTO: AGUNG AIR

Dermaga ini terpisah dari pelabuhan utama, bentuknya sederhana karena jarak tempuh ke pulau itu tidak lebih dari 15 menit. Saya melihat banyak parkir motor di depan dermaga, karena penduduk pulau itu sebagian besar bekerja dan sekolah di Pulau Bintan.

Dengan tarif Rp9.000 per orang, saya menunggu muatan perahu penuh. Setiap 15 penumpang terkumpul, maka perahu bermesin 2 PK ini akan jalan. Laut yang disisir tenang sekali, khas perairan dangkal Selat Malaka. Sewaktu menyeberang ini saya menyadari bahwa transportasi laut adalah kunci konektivitas banyak wilayah Indonesia, yang diisi sebagian besar oleh samudera, bukan daratan.

Putih Telur

Sesampainya di Penyengat, saya disambut bangunan Masjid Raya Sultan Riau. Masjid yang berdiri pada abad ke-19 ini berwarna dominan kuning dengan corak hijau. Sebuah formula warna kebangsawanan Melayu. Konon material perekat masjid beton ini ialah putih telur ayam. Dapat dibayangkan, pembuatan masjid berkubah seperti

minaret di Istanbul ini pada zamannya memakan biaya yang besar.

Mengapa mahal? Sebab tidak ada yang bisa dihasilkan dari pulau mini berukuran 2 km persegi ini, yang ukurannya tak lebih dari 7 kali luas GBK di Jakarta. Tidak ada pertanian dan peternakan, hanya laut yang menemani kehidupan penduduknya. Sehingga material konstruksi dan bahan makanan, selain pangan bahari, sebagian besar impor dari luar pulau.

Sang Pujangga

Lantas mengapa pilihan membangun masjid kesultanan di Penyengat? Itu karena pulau ini merupakan salah satu pusat pemerintahan penting bagi Kesultanan Riau-Lingga. Pada masa lampau, usai Kesultanan Malaka takluk oleh Portugis pada abad ke-16, Kesultanan Riau-Lingga menjadi penerus kemaharajaan Melayu di semenanjung. Raja yang bergelar Yang Dipertuan-Muda berkantor di pulau ini dengan wewenang perdagangan sampai militer.

Selain menjadi pusat pemerintahan, pulau ini jadi hunian

privat keluarga Yang Dipertuan-Muda. Salah satu keluarga raja yang mahsyur, Raja Ali Haji. Seorang pujangga melayu yang mengarang syair Gurindam dua belas. Namun bagi bangsa Indonesia ia terkenal karena mencoba menyusun kamus bahasa melayu yang menjadi cikal-bakal bahasa Indonesia.

Raja Ali Haji punya segudang aktivitas intelektual. Terbukti di pulau kecil ini, sudah ada semacam kantor penerbitan dan klub intelektual, Rusydiyah Club, yang menjalin kontak dengan percetakan di Singapura. Alhasil pulau kecil ini menghasilkan banyak literatur dan penulis melayu di awal abad 19.

Takkan Melayu Hilang Di Bumi

Pulau yang dahulunya dihuni keluarga kerajaan ini tinggal kenangan. Memori itu mewujudkan menjadi makam-makam para keluarga raja di setiap sudut pulau. Tak heran, beberapa dinasti keluarga kerajaan di Malaysia bahkan menjadikan Penyengat sebagai tempat ziarah nenek moyang mereka.



Sarmuji

Si Jago Masak

Sebagian besar masyarakat masih mengenal figur politisi sebagai pribadi yang serius.

Tak jarang, kesan kaku dan berjarak pun lekat menempel.

Namun, siapa sangka, di balik keseriusan menjalankan tugas sebagai penyalur aspirasi rakyat, ternyata memiliki hobi unik, memasak.



ikan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu di waktu SMP," kenang Sarmuji.

Lambat laun, tuturnya, kebiasaan tersebut terus berkembang menjadi rutinitas dari siang selepas sekolah hingga malam ngaji di pondok. Seiring perkembangan waktu, tanpa disadarinya rutinitas inilah yang membentuk Sarmuji menjadi ahli masak (chef).

Bila ada waktu senggang, politisi Partai Golkar itu, pergi ke pasar untuk belanja bahan masakan. Ia suka sekali memasak rawon, soto, bandeng bakar pecel santan, botok, hingga masakan rumahan khas Jawa Timur.  pun/mh

Memasak? Ya, hobi masak. Inilah yang dilakukan Sarmuji, Wakil

Ketua Komisi VI DPR RI. Saat diwawancarai Parlemen secara eksklusif di meja pimpinan, akhir Maret lalu, ia nampak bersemangat menceritakan hobi yang terbilang jarang dimiliki.

Diceritakannya, hobi memasak tersebut sudah dilakoni sejak kecil, ketika

masa SMP. Diawali dari ketidaksengajaan karena setiap pagi ditinggal sang ibu berbelanja, membuat Sarmuji kecil secara otodidak mulai berinisiatif menanak nasi hingga mengolah kreasi sayur-mayur.

"Saya sudah semenjak SMP masak. Malam ngaji. Pagi ibu saya pergi ke pasar untuk berbelanja yang akan dijual lagi di toko. Subuh saya yang masak. Jadi, saya yang ditinggalin untuk menanak nasi, membuat sayur sederhana, atau menggoreng



Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menghadiri Rapat Kerja bersama DPR RI. Foto: Dep/nr



Tangis Wakil Rakyat dan Ibu Menteri

Tangis haru pecah kala Muhammad Ali Ridha, legislator asal Jawa Timur XI mengisahkan kisah Ibu Semi. Seorang wanita 90 tahun yang berjuang hidup sebatang kara dengan hanya bekerja sebagai pembuat kerupuk lempeng. Dengan upah hanya Rp5.000, Ibu Semi bahkan tak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Dengan menahan tangis, Ridha menceritakan pengalamannya menyambangi rumah Ibu Semi di Magetan.

Ia mengatakan, Ibu Semi tidak memiliki beras untuk dikonsumsi. Suaranya bergetar saat menceritakan bagaimana Ibu Semi mengonsumsi tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa menu apapun.

"Dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa menu apa pun. Saya tahu mungkin ini temuan saya satu-dua. Saya yakin Ibu Menteri menemukan banyak hal seperti ini karena wilayah yang Ibu tangani adalah di seluruh Nusantara ini," keluh Ridho.

Dalam suasana rapat dengan Kementerian Sosial itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini terdengar terisak di balik mejanya. Ia pun sempat menutup wajahnya menahan tangis.

 **bia/mh**



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

mengucapkan
SELAMAT HARI

NYEPI

11 MARET 2024

1 SAKA 1946



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri